



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Untung Surapati 2 Semarapura; Telepon (0366)21382; Fax (0366)23337



PEMUTAKHIRAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJMD) SEMESTA
BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2018-2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

TIM PEMBUAT KLHS RPJMD
KABUPATEN KLUNGKUNG

SEMARAPURA
2022



KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas karunia-Nya sehingga Tim Pembuat Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 berlangsung lancar dan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Induk sesuai waktu yang direncanakan.

Ringkasan Eksekutif ini merupakan salah satu Laporan Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang memuat kondisi umum daerah, kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, skenario pembangunan berkelanjutan, serta isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah. Secara substansial, Penyusunan Laporan Induk Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selanjutnya Dokumen ini dapat dijadikan rekomendasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung 2018-2023 untuk dapat ditetapkannya sebagai peraturan daerah. Terlaksananya pembuatan KLHS ini berkat dukungan anggota Tim Pembuat Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi atas kerja sama Tim yang baik dalam menyelesaikan pembuatan Laporan ini.

Semarapura, 25 Pebruari 2022
Ketua Tim Penyusun KLHS RPJMD
Kabupaten Klungkung,

Ir. I GEĐE PUTU WINASTRA, MMA

NIP. 196307211988031013



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Klungkung pada tahun 2018 melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak untuk masa jabatan 2018 – 2023. Berkaitan dengan hal tersebut Baperlitbang menyiapkan rancangan awal RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018 - 2023. Memenuhi amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka penyusunan rancangan awal RPJMD disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pembuatan KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya alternatif proyeksi kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang akan dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Sehubungan dengan adanya Pemutakhiran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dikarenakan adanya wabah pandemi COVID-19 sehingga banyak target yang tidak tercapai selain itu adanya perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, untuk itu perlu dilakukan pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.

Lingkup kegiatan pembuatan KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2023 mengacu kepada PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Secara garis besarnya pembuatan KLHS dalam penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung memuat pengkajian pembangunan berkelanjutan yang memuat kondisi umum daerah, capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, dan kontribusi/peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya; skenario pembangunan berkelanjutan; dan rumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah.

Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan luas wilayah 315 km² atau 5,89% dari luas wilayah Provinsi Bali, terdiri atas 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan dan Nusa Penida, dengan jumlah desa keseluruhan sebanyak 59 desa/kelurahan. Secara kewilayahan, Kabupaten Klungkung dapat dibedakan atas Klungkung daratan yaitu wilayah kabupaten yang berada dan sebagai bagian dari sistem Pulau Bali dan Klungkung kepulauan yaitu gugusan 3 pulau kecil yang termasuk Kecamatan Nusa Penida, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.



Secara morfologi wilayah Kabupaten Klungkung terdiri atas 5 unit lahan yaitu dataran pantai, perbukitan, kipas dan lahar, rawa pasang surut dan teras. Unit lahan dataran pantai mendominasi di wilayah Kecamatan Banjarangkan dan Klungkung. Unit lahan perbukitan (*hills*) mendominasi di wilayah Kecamatan Dawan, serta sebagian kecil daerah hulu Kecamatan Banjarangkan dan Klungkung. Sedangkan unit lahan teras merupakan morfologi Kawasan karst mendominasi wilayah Kecamatan Nusa Penida.

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Klungkung terletak pada ketinggian 0 – 625 m dpl dengan kemiringan lahan berkisar antara datar sampai terjal. Wilayah Kecamatan Banjarangkan mempunyai ketinggian 0 – 450 m dpl, Kecamatan Klungkung pada ketinggian 0 – 430 m dpl dan Kecamatan Dawan pada ketinggian 0 – 625 m dpl. Sedangkan Kecamatan Nusa Penida berada pada ketinggian 0 – 530 m dpl.

Formasi geologi wilayah Kabupaten Klungkung dapat dibedakan atas 2 (dua) kelompok utama yaitu Klungkung daratan yang didominasi oleh batuan produk gunungapi dan kepulauan Nusa Penida didominasi oleh batuan sedimen sebagai Formasi Selatan terutama tersusun atas batugamping terumbu. Sedangkan jenis tanah terdiri atas tiga jenis yaitu tanah regosol yang mendominasi Kecamatan Banjarangkan dan Klungkung, latosol mendominasi Kecamatan Dawan dan medeteran mendominasi wilayah Kecamatan Nusa Penida.

Di wilayah Klungkung daratan mengalir beberapa sungai besar yaitu Tukad Unda, Tukad Telaga Waja, Tukad Jinah, Tukad Bubuh dan Tukad Melangit yang merupakan sungai lintas kabupaten. Sedangkan sungai-sungai di Nusa Penida hanya mengalir pada musim hujan, terutama pada saat hujan dan setelah hujan turun, sehingga potensi air sungai di daerah ini tidak dapat digunakan kebutuhan irigasi dan penyediaan air bersih bagi penduduknya. Di wilayah Klungkung daratan terdapat 38 mata air dan 26 mata air yang telah terinventarisasi potensi airnya dengan total debit air 774,33 liter/detik dan volume airnya mencapai 24,42 juta m³/tahun. Di Nusa Penida terdapat 16 mata air akan tetapi hanya 8 mata air mempunyai potensi dengan total debit air 524,60 l/dt. Di wilayah Kabupaten Klungkung terdapat dua Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Denpasar-Tabanan dengan jumlah imbunan air tanah bebas 894 juta m³/tahun dan imbunan air tanah tertekan sebesar 8 juta m³/tahun, dan CAT Nusa Penida dengan jumlah imbunan air tanah bebas 39 juta m³/tahun.

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidro-meteorologis, wilayah Kabupaten Klungkung berpotensi mengalami bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut.

Jumlah penduduk Kabupaten Klungkung berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 adalah 206.925 jiwa. Jumlah penduduk menurut kecamatan berkisar 40.889 – 64.235 jiwa, terbanyak di Kecamatan Klungkung dan terkecil di Kecamatan Dawan. Kepadatan penduduk tahun 2020 adalah rata-rata 657 jiwa/km², tertinggi di Kecamatan Klungkung (2.211 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Nusa Penida (283 jiwa/km²).

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Klungkung periode 2010-2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 meningkat menjadi rata-rata 2,09% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Nusa Penida adalah tertinggi yaitu 2,69%, disusul Dawan sebesar 2,29%, Banjarangkan sebesar 1,91%, dan Klungkung 1,61%.



Dengan menggunakan persamaan sesuai Pedoman Penentuan Status Daya Dukung Lahan dan Daya Dukung Air Kementrian Negara Lingkungan Hidup (2009), daya tampung penduduk wilayah Kabupaten Klungkung dapat dihitung jumlahnya berdasarkan luas lahan efektif yang dapat dimanfaatkan yaitu sebanyak 87.812 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Klungkung “telah melampaui daya dukungnya”. Untuk standar daerah telah terlampaui sebanyak 119.113 orang atau 135,65% dari daya tampungnya. Daya tampung penduduk di seluruh kecamatan telah terlampaui dimana untuk standar daerah, Kecamatan Nusa Penida terlampaui 9,67%, Banjarangkan sebanyak 185,75%, Klungkung sebanyak 769,36%, dan Dawan sebanyak 225,52%.

Hasil analisis kemampuan lahan wilayah Kabupaten Klungkung diketahui klasifikasi kemampuan lahan wilayah dapat dikelompokkan menjadi 8 kelas. Kelas kemampuan lahan paling luas adalah kelas VI (24,75%), disusul kelas III (20,15%), kelas IV (16,84%), kelas VIII (10,69%), kelas II (9,69%), kelas VII (8,77%), kelas I (8,41%) dan kelas V (0,71%).

Ketersediaan lahan di Kabupaten Klungkung yang sesuai untuk kawasan permukiman adalah seluas 19.445.94 Ha dengan sebaran 14.887.73 Ha di Kecamatan Nusa Penida, 1.539.93 Ha di Kecamatan Banjarangkan, 1.419.05 Ha di Kecamatan Klungkung, dan 1.599.24 Ha di Kecamatan Dawan. Sedangkan kebutuhan lahan permukiman berdasarkan penjumlahan dari proyeksi kebutuhan rumah, lahan perumahan, serta fasos dan fasum pada tahun 2020 adalah 1.195,4 ha, dengan sebaran 331,7 Ha di Kecamatan Nusa Penida, 256,9 Ha di Kecamatan Banjarangkan, 371,4 Ha di Kecamatan Klungkung, dan 236,4 Ha di Kecamatan Dawan. Kebutuhan lahan permukiman pada tahun 2033 meningkat menjadi 1.571,4 Ha. Dengan demikian, status daya dukung lahan permukiman di Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 dan tahun 2033 adalah surplus yang artinya ketersediaan lahan untuk permukiman lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan lahan untuk permukiman.

Ketersediaan lahan dihitung berdasarkan produksi aktual dari masing-masing komoditas yang terdapat di masing-masing kecamatan meliputi komoditas pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nilai produksi total seluruh komoditas di Kabupaten Klungkung adalah Rp. 1.301.926 juta. Berdasarkan perhitungan nilai produksi komoditas, harga satuan beras, dan produktivitas beras maka diperoleh ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Klungkung yaitu 35.458,21 ha dengan sebaran 11.509,22 Ha di Kecamatan Nusa Penida, 9.175,55 Ha di Kecamatan Banjarangkan, 5.421,13 Ha di Kecamatan Klungkung, dan 9.352,31 Ha di Kecamatan Dawan. Kebutuhan lahan pertanian dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak. Luas lahan pertanian yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009, untuk kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1000 kg setara beras/kapita/tahun. Produktivitas padi setara beras di Kabupaten Klungkung tahun 2020 adalah 3.991 kg/ha/tahun. Dengan menggunakan asumsi dan data tersebut di atas maka kebutuhan lahan untuk hidup layak pada tahun 2020 adalah 51.848 ha, serta pada tahun 2025 dan 2033 berdasarkan proyeksi jumlah penduduk yaitu masing-masing 57.559 ha dan 68.097 ha. Dengan demikian, status daya dukung lahan pertanian pada tahun 2020 adalah defisit dengan nilai indeks 0,68. Defisit daya dukung lahan di semua kecamatan dengan nilai indeks berkisar 0,34 – 0,91 dimana defisit terbesar di Kecamatan Klungkung dan terendah di Kecamatan Dawan. Defisit daya dukung lahan pada tahun 2025 dan 2033 diproyeksikan semakin tinggi dimana nilai indeks pada



tahun 2025 sebesar 0,62 dan tahun 2033 sebesar 0,55. Nilai indeks daya dukung lahan menurut kecamatan tahun 2025 berkisar 0,31 – 0,82 dan tahun 2033 berkisar 0,27 – 0,68.

Berdasarkan data koefisien limpasan, curah hujan tahunan dan luas wilayah diperoleh ketersediaan air permukaan di Kabupaten Klungkung sebesar 191,73 juta m³/tahun. Ketersediaan air permukaan di Nusa Penida 102,83 juta m³/tahun, Banjarangkan 40,14 juta m³/tahun, Dawan 21,43 juta m³/tahun, dan Klungkung 20,84 juta m³/tahun. Berdasarkan debit CAT per hektar diperoleh bahwa potensi ketersediaan air tanah sebanyak 114,53 juta m³/tahun dengan sebaran ketersediaan air menurut kecamatan berkisar 7,52 juta – 78,74 juta m³/tahun. Dengan demikian ketersediaan air permukaan dan air tanah dari CAT secara keseluruhan sebanyak 299,78 juta m³/tahun. Dimana ketersediaan air terbanyak adalah Kecamatan Nusa Penida dan terendah Kecamatan Dawan.

Sementara itu, dengan menggunakan persamaan penghitungan kebutuhan air diperoleh kebutuhan air di Kabupaten Klungkung tahun 2020 sebanyak 331,08 juta m³/tahun, meningkat menjadi 367,55 juta m³/tahun pada tahun 2025 dan 408,21 juta m³/tahun pada tahun 2030. Sesuai dengan jumlah penduduk, kebutuhan air terbanyak di Kecamatan Klungkung dan terkecil di Kecamatan Dawan. Berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air, status daya dukung air permukaan di Kabupaten Klungkung tahun 2020 adalah defisit dengan indeks 0,58 atau defisit sebanyak 139,35 juta m³/tahun. Defisit terutama tiga kecamatan di Klungkung daratan, sementara di Kecamatan Nusa Penida masih surplus sebanyak 11,04 juta m³/tahun atau dengan indeks 1,12. Akan tetapi, daya dukung air permukaan di Nusa Penida pada tahun 2025 menjadi defisit sebanyak 1,99 juta m³/tahun (indeks 0,98) dan tahun 2030 defisit meningkat menjadi 16,87 juta m³/tahun (indeks 0,86). Sementara daya dukung air permukaan secara umum di Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 semakin defisit dengan indeks 0,52 dan tahun 2030 menurun dengan indeks 0,48.

Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berdasarkan jasa ekosistem menggunakan empat kategori jasa ekosistem yang dikelaskan kedalam 15 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu :

- a. Jasa penyediaan : (1) pangan, (2) air bersih, (3) energi, dan (4) sumberdaya genetik.
- b. Jasa Pengaturan : (5) Pengaturan iklim, (6) Pengaturan tata aliran air dan banjir, (7) Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam, (8) Pemurnian air, (9) Pengolahan dan penguraian limbah, dan (10) Pemeliharaan kualitas udara.
- c. Jasa Budaya : (11) Tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of place*), (12) Rekreasi dan ekoturisme, dan (13) Estetika Alam.
- d. Jasa Pendukung : (14) Siklus hara, dan (15) Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah).

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) berdasarkan jasa ekosistem penyediaan menunjukkan sebagian besar wilayah mempunyai daya dukung penyediaan pangan kategori sangat rendah (68,19%). Daya dukung penyediaan pangan di Nusa Penida didominasi kategori sangat rendah (97,23%), Banjarangkan dan Klungkung didominasi daya dukung kategori sangat tinggi yaitu masing-masing 58,80% dan 78,98%, sedangkan Dawan relatif seimbang daya dukung kategori sangat tinggi, rendah dan sangat rendah.

Daya dukung penyediaan air bersih Kabupaten Klungkung didominasi kategori sangat rendah (71,99%). Seluruh (100%) wilayah Kecamatan Nusa Penida memiliki daya dukung penyediaan air kategori sangat rendah, Banjarangkan dan Klungkung didominasi daya dukung



kategori tinggi yaitu masing-masing 57,61% dan 78,63%, sedangkan Dawan relatif seimbang daya dukung kategori tinggi dan sangat rendah yaitu masing-masing 33,55% dan 35,55%.

Daya dukung penyediaan energi Kabupaten Klungkung didominasi kategori rendah (66,09%). Daya dukung penyediaan energi di Nusa Penida didominasi kategori rendah (91,57%), sedangkan Banjarangkan, Klungkung dan Dawan didominasi daya dukung kategori sedang yaitu masing-masing 56,42%, 76,43% dan 51,99%.

Daya dukung penyediaan sumber daya genetik Kabupaten Klungkung didominasi kategori rendah (69,15%). Daya dukung penyediaan sumber daya genetik di Nusa Penida didominasi kategori rendah (96,17%), Banjarangkan dan Klungkung didominasi daya dukung kategori sedang yaitu masing-masing 56,42% dan 76,43%, sedangkan Dawan relatif seimbang daya dukung kategori sedang dan rendah yaitu masing-masing 33,79% dan 34,03%.

Daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori rendah (63,20%). Daya dukung jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Nusa Penida didominasi kategori rendah (93,29%), Banjarangkan dan Klungkung didominasi daya dukung kategori sangat tinggi yaitu masing-masing 55,28% dan 80,47%, sedangkan Dawan sebagian besar memiliki daya dukung kategori sangat rendah (46,92%).

Daya dukung jasa budaya rekreasi dan ekoturisme wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori rendah (67,22%). Daya dukung jasa budaya rekreasi dan ekoturisme di Nusa Penida didominasi kategori rendah (92,26%), Banjarangkan dan Klungkung didominasi daya dukung kategori tinggi yaitu masing-masing 42,29% dan 64,52%, sedangkan Dawan didominasi daya dukung kategori sangat rendah (50,49%).

Daya dukung jasa budaya estetika alam wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori sangat rendah (70,03%). Daya dukung jasa budaya estetika alam di Nusa Penida didominasi kategori sangat rendah (95,64%), Banjarangkan dan Klungkung didominasi daya dukung kategori tinggi yaitu masing-masing 42,29% dan 65,01%, sedangkan Dawan didominasi daya dukung kategori sangat rendah (54,95%).

Daya dukung jasa pendukung siklus hara wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori sangat rendah (67,57%). Daya dukung jasa pendukung siklus hara di Nusa Penida didominasi kategori rendah (97,75%), Banjarangkan dan Klungkung didominasi daya dukung kategori sangat tinggi yaitu masing-masing 63,36% dan 65,01%, sedangkan Dawan memiliki daya dukung jasa pendukung siklus hara relatif seimbang antara kategori sangat tinggi dan rendah yaitu masing-masing 25,27% dan 30,66%.

Daya dukung jasa pendukung biodiversitas (perlindungan plasma nutfah) wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori sangat rendah (73,94%). Daya dukung jasa pendukung biodiversitas di Nusa Penida didominasi kategori sangat rendah (99,03%), Banjarangkan dan Klungkung didominasi daya dukung kategori sedang yaitu masing-masing 57,69% dan 77,26%, sedangkan Dawan sebagian besar memiliki daya dukung jasa pendukung biodiversitas kategori sangat rendah (40,44%).

Daya tampung berdasarkan jasa pengaturan iklim wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori rendah (83,10%). Daya tampung jasa pengaturan iklim di wilayah kecamatan semuanya didominasi kategori rendah dimana dominasi kategori rendah di Nusa Penida mencapai 92,07%, Banjarangkan 63,15%, Klungkung 83,22% dan Dawan 53,27%.



Daya tampung jasa pengaturan tata air dan pencegahan banjir wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori sangat rendah (72,29%). Daya tampung jasa pengaturan tata air dan pencegahan banjir wilayah Kecamatan Nusa Penida juga didominasi kategori rendah (96,88%), sedangkan Banjarangkan dan Klungkung didominasi kategori sedang yaitu masing-masing 40,79% dan 64,03%. Sementara itu di Kecamatan Dawan sebagian besar kategori sedang dan sangat rendah yaitu masing-masing 39,15% dan 38,57%.

Daya tampung jasa perlindungan dari bencana alam wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori rendah (66,53%). Daya tampung jasa perlindungan dari bencana alam di wilayah Kecamatan Nusa Penida dan Dawan juga didominasi kategori rendah yaitu masing-masing 92,01% dan 51,07%. Sedangkan Banjarangkan dan Klungkung didominasi kategori sedang yaitu masing-masing 40,79% dan 64,03%.

Daya tampung jasa pemurnian air wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori rendah (65,44%). Daya tampung jasa pemurnian air di wilayah Kecamatan Nusa Penida juga didominasi kategori rendah (93,35%). Banjarangkan dan Klungkung didominasi kategori sangat tinggi yaitu masing-masing 40,79% dan 64,02%. Sedangkan Kecamatan Dawan didominasi kategori sedang dan rendah, masing-masing 31,16% dan 29,99%.

Daya tampung jasa penguraian limbah wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori sangat rendah (67,99%). Daya tampung jasa penguraian limbah di wilayah Kecamatan Nusa Penida juga didominasi kategori sangat rendah (96,97%). Banjarangkan dan Klungkung didominasi kategori sangat tinggi yaitu masing-masing 62,13% dan 64,03%. Sedangkan Kecamatan Dawan relatif seimbang antara kategori sangat tinggi, sedang dan sangat rendah, yaitu masing-masing 26,61%, 21,73% dan 30,29%.

Daya tampung jasa pemeliharaan kualitas udara wilayah Kabupaten Klungkung didominasi kategori rendah (68,99%). Daya tampung jasa pemeliharaan kualitas udara di wilayah Kecamatan Nusa Penida juga didominasi kategori rendah (94,87%). Banjarangkan dan Klungkung didominasi kategori sedang yaitu masing-masing 57,58% dan 77,26%. Sedangkan Kecamatan Dawan relatif seimbang antara kategori sedang dan rendah, yaitu masing-masing 44,17% dan 40,78%.

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Klungkung dalam periode 2016 – 2019 terus mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pendapatan daerah pada tahun 2016 sebanyak Rp. 1.028,59 M meningkat menjadi Rp. 1.215,59 M pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebanyak Rp. 1.104,88 M. Dalam periode tersebut, laju pertumbuhan pendapatan daerah berfluktuasi dalam kisaran -9,11 – 1,61%. Angka laju pertumbuhan tertinggi tahun 2016 dan terendah tahun 2020 yang terkontaksi mencapai 9,11%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya PAD, Dana Transfer, dan juga Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah yang dikenal sebagai derajat desentralisasi fiskal dalam periode 2016 – 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi semakin tinggi.



Pada tahun 2016, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Klungkung telah mencapai angka di atas 10% tepatnya sebesar 13,10% dan pada tahun 2020 telah mencapai 19,99%. Walaupun masih dalam kategori “kurang”, tingkat kemampuan Kabupaten Klungkung dalam menyelenggarakan desentralisasi semakin meningkat.

Rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi, menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 – 2020, rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Klungkung meningkat dari 15,91% tahun 2016 menjadi 26,01% tahun 2020 serta rata-rata sebesar 20,77%. Meningkatnya rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan kenaikan pendapatan daerah serta kebutuhan dan tuntutan untuk meningkatkan pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan terutama dalam kerangka pelayanan publik, belanja daerah pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,. Selama periode 2016 – 2019, belanja daerah terus mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,47%.

Belanja daerah Kabupaten Klungkung masih didominasi oleh Belanja Operasi. Pada rentang waktu 2016-2020, persentase Belanja Operasi berada di atas 50% dengan rata-rata 85,00%. Bahkan terjadi peningkatan rasio belanja operasi yaitu dari 77,63% tahun 2016 menjadi 92,46% tahun 2020.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Klungkung dalam periode 2016 – 2019 meningkat signifikan dari tahun ke tahun namun tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi COVID-19. PDRB-ADHB pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.105,90 milyar, meningkat dari Rp. 7.112,02 milyar di tahun 2016. Sementara pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019 menjadi Rp. 8.468,30 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK) pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.990,99 milyar, meningkat dari Rp. 5.115,61 milyar di tahun 2016. Sementara pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 5.610,54 milyar.

Dilihat dari lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Selama periode 2016-2019, kontribusi lapangan usaha ini terus menurun dari 23,24% menjadi 21,00%, akan tetapi pada kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 kontribusinya meningkat menjadi 22,46% sebagai dampak dari menurunnya kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang cukup besar dari 14,59% menjadi 10,33%. Walaupun terjadi penurunan, kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih menduduki posisi terbesar kedua seperti halnya sebelum pandemi.

Lapangan usaha lainnya yang berkontribusi di papan tengah yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Informasi dan Komunikasi. Kontribusi ketiga lapangan usaha ini cenderung meningkat dalam periode 2016-2020 termasuk dalam masa pandemi. Sementara itu, kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor relatif konstan terutama dalam empat tahun terakhir.

Pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Klungkung dalam periode 2016-2019 berkisar 5,32- 6,28%, dimana angka tertinggi dicapai pada tahun 2018 dan terendah tahun 2017. Pada tahun 2020, ekonomi Bali terkonstraksi menjadi -9,31% sebagai dampak pandemi COVID-19 dan ekonomi Kabupaten Klungkung terkonstraksi menjadi -6,35%. Selama periode ini 2016-2019, laju



pertumbuhan ekonomi Klungkung berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Klungkung berkontraksi mencapai minus (-) 6,35% akan tetapi tidak separah kontraksi laju pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai minus (-) 9,21%.

Laju pertumbuhan kategori lapangan usaha pada tahun 2020 sebagian besar mengalami penurunan, kecuali Informasi dan Komunikasi, dan sebagian besar penurunannya hingga minus. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai penumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB berkontraksi (-)1,31%. Penyediaan Makanan dan Minuman sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB, mengalami penurunan hingga (-)31,94%. Pada periode 2015-2019, laju pertumbuhan lapangan usaha ini rata-rata 5,35 – 10,26% pertahun. Transportasi dan Pergudangan terdampak sangat parah oleh pandemi dimana laju pertumbuhannya (-)34,70%. Lapangan usaha yang berkontribusi relatif tinggi terhadap PDRB tetapi mengalami pertumbuhan yang menurun cukup tinggi yaitu Industri Pengolahan (minus 5,87%), Konstruksi (minus 5,51%), dan Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor (minus 7,74%).

Pada periode 2016-2019, PDRB per kapita Kabupaten Klungkung atas dasar harga berlaku terus meningkat dari Rp. 40,256 juta menjadi Rp. 50,850. Besarnya PDRB per kapita tahun 2019 ini masih di bawah angka Provinsi yang mencapai Rp. 58,138 juta. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 47,073 juta atau sebesar 7,43% dibandingkan tahun 2019. PDRB perkapita ADHB Provinsi Bali tahun 2020 besarnya Rp. 51,181 juta. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, PDRB perkapita Kabupaten Klungkung pada periode 2016-2019 meningkat dari Rp. 29,049 juta menjadi 33,451 juta. Besarnya PDRB per kapita tahun 2019 ini masih di bawah angka Provinsi yang mencapai Rp. 37.514 juta. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp. 31,187 juta atau sebesar 6,77% dibandingkan tahun 2019. Sementara PDRB perkapita Provinsi Bali tahun 2020 besarnya Rp. 33,681 juta.

Berdasarkan analisis *Location Qoutient* (LQ) PDRB, sektor unggulan atau basis bagi perekonomian Kabupaten Klungkung meliputi Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya. Melalui analisis Tipologi Klasen diketahui bahwa sektor unggulan dan tumbuh pesat di Kabupaten Klungkung yaitu Industri Pengolahan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa Kesehatan. Sektor unggulan tetapi pertumbuhannya tertekan yaitu Pertanian, Pertambangan, Pengadaan Air Sampah Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Lainnya. Sedangkan sektor potensial dan masih dapat dikembangkan meliputi Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan, Real Estate, dan Jasa Pendidikan. Sementara itu, terdapat 3 lapangan usaha yang bukan potensial dan tertinggal yaitu Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, dan Jasa Perusahaan.

Daya saing daerah dianalisis melalui variabel : (a) sumber daya alam (lahan pertanian dan air), (b) infrastruktur (panjang dan kondisi jalan), dan (c) sumber daya manusia (ketenagakerjaan dan pendidikan). Dari aspek sumber daya alam, Kabupaten Klungkung hanya memiliki keunggulan daya saing sumber daya lahan hutan rakyat dan sumber daya air. Dari aspek infrastruktur, Klungkung memiliki keunggulan daya saing aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan. Dari aspek ketenagakerjaan, Kabupaten Klungkung memiliki keunggulan daya saing Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menunjukkan penduduk Kabupaten Klungkung lebih aktif secara ekonomi dibandingkan kabupaten/kota lainnya Bali, serta tingkat pengangguran terbuka yang



sangat rendah. Namun demikian Klungkung mempunyai kelemahan dalam hal angka ketergantungan umur yang relatif tinggi. Sementara ditinjau dari aspek Pendidikan, Kabupaten Klungkung memiliki kelemahan hampir semua sub-variabel seperti rendahnya angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah dan tingkat pendidikan.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Gambaran kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

Tujuan 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Di Mana Pun

Indikator-indikator pada Tujuan 1 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 1.2.1 : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
2. Indikator 1.3.1(a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
3. Indikator 1.3.1(d) : Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
4. Indikator 1.4.1(a) : Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
5. Indikator 1.4.1(b) : Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
6. Indikator 1.4.1(c) : Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin.
7. Indikator 1.4.1(d) : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
8. Indikator 1.4.1(e) : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
9. Indikator 1.4.1(g) : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
10. Indikator 1.4.1(h) : Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
11. Indikator 1.4.1(j) : Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
12. Indikator 1.4.1(k) : Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
13. Indikator 1.5.1(a) : Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
14. Indikator 1.5.1(b) : Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
15. Indikator 1.5.1(c) : Pendampingan psikososial korban bencana sosial.

Indikator-indikator pada Tujuan 1 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 1.3.1(b) : Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
2. Indikator 1.3.1(c) : Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
3. Indikator 1.4.1(f) : Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.
4. Indikator 1.4.1(i) : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.



5. Indikator 1.5.1* : Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
6. Indikator 1.5.1(a) : Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
7. Indikator 1.5.1(d) : Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.
8. Indikator 1.5.1(e) : Indeks risiko bencana pada pusat- pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
9. Indikator 1.5.2 (a) : Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
10. Indikator 1.5.3* : Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Indikator-indikator pada Tujuan 2 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 2.1.1(a) : Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.
2. Indikator 2.1.2* : Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
3. Indikator 2.1.2(a) : Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
4. Indikator 2.2.1 : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
5. Indikator 2.2.2* : Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
6. Indikator 2.2.2(a) : Prevalensi anemia pada ibu hamil.
7. Indikator 2.2.2(b) : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
8. Indikator 2.3.1 : Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
9. Indikator 2.4.1 : Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
10. Indikator 2.5.2* : Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.

Indikator-indikator pada Tujuan 2 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 2.2.2(c) : Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan.
2. Indikator 2.5.1* : Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Indikator-indikator pada Tujuan 3 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 3.1.1* : Angka Kematian Ibu (AKI).



2. Indikator 3.1.2(a) : Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
3. Indikator 3.2.1* : Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
4. Indikator 3.2.2* : Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
5. Indikator 3.2.2(a) : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
6. Indikator 3.2.2(b) : Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
7. Indikator 3.3.2 : Kejadian TB per 1000 orang.
8. Indikator 3.3.2(a) : Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
9. Indikator 3.3.3* : Kejadian Malaria per 1000 orang.
10. Indikator 3.3.3(a) : Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
11. Indikator 3.3.4 : Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.
12. Indikator 3.3.4(a) : Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
13. Indikator 3.3.5* : Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
14. Indikator 3.4.1(b) : Prevalensi tekanan darah tinggi.
15. Indikator 3.4.2* : Angka kematian (*insidens rate*) akibat bunuh diri.
16. Indikator 3.4.2(a) : Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
17. Indikator 3.5.1(b) : Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.
18. Indikator 3.6.1 : Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.
19. Indikator 3.7.1(a) : Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
20. Indikator 3.7.1(b) : Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
21. Indikator 3.7.2* : Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*).
22. Indikator 3.7.2(a) : Total Fertility Rate (TFR).
23. Indikator 3.8.1(a) : *Unmet need* pelayanan kesehatan.
24. Indikator 3.9.1 : Angka kematian akibat polusi udara ambien.
25. Indikator 3.9.2 : Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis.
26. Indikator 3.9.3 : Angka kematian akibat keracunan.

Indikator-indikator pada Tujuan 3 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 3.3.1 : Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.
2. Indikator 3.4.1 : Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.
3. Indikator 3.4.1(c) : Prevalensi obesitas pada penduduk umur <18 tahun.
4. Indikator 3.5.1(a) : Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.



5. Indikator 3.5.1(d) : Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.
6. Indikator 3.5.1(e) : Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
7. Indikator 3.8.2(a) : Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Indikator-indikator pada Tujuan 3 yang belum didukung ketersediaan data sehingga tidak dapat dianalisis kondisi pencapaiannya meliputi :

1. Indikator 3.4.1(a) : Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.
2. Indikator 3.5.1(c) : Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.
3. Indikator 3.5.2* : Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.

Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Indikator-indikator pada Tujuan 4 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 4.1.1* : Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
2. Indikator 4.1.1(a) : Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
3. Indikator 4.1.1(b) : Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
4. Indikator 4.1.1(e) : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
5. Indikator 4.4.1* : Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
6. Indikator 4.5.1* : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
 - a) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki laki SD/MI/ sederajat.
 - b) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat
 - c) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat
 - d) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki diperguruan Tinggi.
7. Indikator 4.6.1(b) : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun.
8. Indikator 4.a.1* : Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).
 - a) Listrik.



Indikator-indikator pada Tujuan 4 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 4.1.1* : Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
 - a) Proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar minimum matematika.
2. Indikator 4.1.1(c) : Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.
3. Indikator 4.1.1(d) : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
4. Indikator 4.1.1(f) : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.
5. Indikator 4.1.1(g) : Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
6. Indikator 4.3.1(a) : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.
7. Indikator 4.3.1(b) : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).
8. Indikator 4.6.1(a) : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
9. Indikator 4.a.1* : Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).
 - a) Internet untuk tujuan pengajaran.
 - b) Komputer untuk tujuan pengajaran.
 - c) Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas.
 - d) Air minum layak.
 - e) Fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin.
 - f) Fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
10. Indikator 4.c.1* : Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

Indikator-indikator pada Tujuan 4 yang belum didukung ketersediaan data sehingga tidak dapat dianalisis kondisi pencapaiannya meliputi :

1. Indikator 4.2.2(a) : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan

Indikator-indikator pada Tujuan 5 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 5.1.1* : Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
2. Indikator 5.2.1* : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
3. Indikator 5.2.1(a) : Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
4. Indikator 5.2.2* : Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.



5. Indikator 5.2.2(a) : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
6. Indikator 5.3.1* : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
7. Indikator 5.3.1(a) : Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
8. Indikator 5.3.1(b) : Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
9. Indikator 5.5.1* : Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
10. Indikator 5.5.2* : Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
11. Indikator 5.6.1(a) : Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
12. Indikator 5.6.1(b) : Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
13. Indikator 5.b.1* : Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Indikator-indikator pada Tujuan 6 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 6.1.1(a) : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
2. Indikator 6.1.1(c) : Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
3. Indikator 6.2.1(a) : Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
4. Indikator 6.2.1(b) : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
5. Indikator 6.2.1(c) : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
6. Indikator 6.3.2(b) : Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
7. Indikator 6.4.1(a) : Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.
8. Indikator 6.5.1(a) : Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
9. Indikator 6.5.1(b) : Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.
10. Indikator 6.5.1(c) : Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
11. Indikator 6.5.1(e) : Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.
12. Indikator 6.5.1(f) : Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.

Indikator-indikator pada Tujuan 6 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :



1. Indikator 6.1.1(b) : Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
2. Indikator 6.1.1(c) : Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
3. Indikator 6.2.1(b) : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
4. Indikator 6.2.1(e) : Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
5. Indikator 6.2.1(f) : Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
6. Indikator 6.3.1 : Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.
7. Indikator 6.3.1(a) : Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
8. Indikator 6.3.1(b) : Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
9. Indikator 6.4.1(b) : Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.
10. Indikator 6.6.1(d) : Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.

Tujuan 7. Menjamin Akses terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan dan Modern Bagi Semua

Indikator-indikator pada Tujuan 7 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 7.1.1* : Rasio elektrifikasi.
2. Indikator 7.1.2(b) : Rasio penggunaan gas rumah tangga.

Indikator-indikator pada Tujuan 7 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 7.1.1(a) : Konsumsi listrik per kapita.
2. Indikator 7.2.1* : Bauran energi terbarukan.

Indikator-indikator pada Tujuan 7 yang belum didukung ketersediaan data sehingga tidak dapat dianalisis kondisi pencapaiannya meliputi :

1. Indikator 7.3.1* : Intensitas energi primer.

Tujuan 8. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Penyerapan Tenaga Kerja Penuh dan Produktif serta Pekerjaan yang Layak bagi Semua

Indikator-indikator pada Tujuan 8 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 8.3.1* : Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
2. Indikator 8.3.1(b) : Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
3. Indikator 8.3.1(c) : Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
4. Indikator 8.5.1* : Upah rata-rata per jam pekerja.



5. Indikator 8.5.2* : Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
6. Indikator 8.8.1 : Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.
7. Indikator 8.8.1(a) : Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.
8. Indikator 8.10.1* : Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.
9. Indikator 8.10.1(a) : Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
10. Indikator 8.10.1(b) : Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.

Indikator-indikator pada Tujuan 8 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 8.1.1* : Laju pertumbuhan PDB per kapita.
2. Indikator 8.1.1(a) : PDRB per kapita.
3. Indikator 8.2.1* : Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
4. Indikator 8.3.1* : Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian untuk laki-laki.
5. Indikator 8.3.1(a) : Persentase tenaga kerja formal.
6. Indikator 8.5.2* : Tingkat pengangguran terbuka.
7. Indikator 8.5.2(a) : Persentase setengah pengangguran.
8. Indikator 8.6.1* : Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
9. Indikator 8.9.1* : Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB
10. Indikator 8.9.1(a) : Jumlah wisatawan mancanegara.
11. Indikator 8.9.1(b) : Jumlah wisatawan nusantara
12. Indikator 8.9.1(c) : Jumlah devisa sektor pariwisata.
13. Indikator 8.9.1(d) : Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja
14. Indikator 8.9.2 : Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.

Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Berketahanan Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Indikator-indikator pada Tujuan 9 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 9.1.2 : Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.
2. Indikator 9.c.1(a) : Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.
3. Indikator 9.c.a(b) : Proporsi individu yang menggunakan Internet.

Indikator-indikator pada Tujuan 9 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 9.1.1(a) : Kondisi mantap jalan kabupaten.
2. Indikator 9.1.2(b) : Jumlah dermaga penyeberangan.
3. Indikator 9.1.2(c) : Jumlah pelabuhan strategis.



4. Indikator 9.2.1* : Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.
5. Indikator 9.2.1(a) : Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur/industri pengolahan.
6. Indikator 9.2.2* : Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur/industri pengolahan.

Indikator-indikator pada Tujuan 9 yang belum didukung ketersediaan data sehingga tidak dapat dianalisis kondisi pencapaiannya meliputi :

1. Indikator 9.3.1* : Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
2. Indikator 9.3.2* : Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
3. Indikator 9.4.1* : Rasio Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.
4. Indikator 9.c.1* : Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.

Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam dan Diantara Negara-Negara

Indikator-indikator pada Tujuan 10 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 10.1.1(b) : Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
2. Indikator 10.1.1(c) : Jumlah desa tertinggal.
3. Indikator 10.1.1(d) : Jumlah Desa Mandiri.
4. Indikator 10.2.1* : Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
5. Indikator 10.3.1 : Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.
6. Indikator 10.3.1(a) : Indeks Kebebasan Sipil.
7. Indikator 10.3.1(b) : Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
8. Indikator 10.3.1(c) : Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Indikator-indikator pada Tujuan 10 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 10.1.1* : Koefisien Gini.
2. Indikator 10.1.1(a) : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
3. Indikator 10.4.1(a) : Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.
4. Indikator 10.4.1(b) : Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Tujuan 11. Mewujudkan Kota-Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Indikator-indikator pada Tujuan 11 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 11.1.1(a) : Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
2. Indikator 11.2.1(a) : Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.



3. Indikator 11.5.1(b) : Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
4. Indikator 11.5.1(c) : Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
5. Indikator 11.7.2(a) : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

Indikator-indikator pada Tujuan 11 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 11.5.1 : Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
2. Indikator 11.5.1(a) : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
3. Indikator 11.5.1(b) : Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.
4. Indikator 11.5.2(a) : Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
5. Indikator 11.6.1(a) : Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
6. Indikator 11.7.1 : Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.

Indikator-indikator pada Tujuan 11 yang belum didukung ketersediaan data sehingga tidak dapat dianalisis kondisi pencapaiannya meliputi :

1. Indikator 11.2.1(a) : Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.
2. Indikator 11.4.1 : Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor)

Tujuan 12. Menjamin Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Indikator-indikator pada Tujuan 12 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 12.4.1(a) : Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.
2. Indikator 12.4.2(a) : Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
3. Indikator 12.5.1(a) : Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
4. Indikator 12.6.1(a) : Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
5. Indikator 12.7.1(a) : Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
6. Indikator 12.8.1(a) : Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.

Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Indikator-indikator pada Tujuan 13 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 13.1.1* : Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.



2. Indikator 13.1.2 : Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
3. Indikator 13.2.1(a) : Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Tujuan 14. Mengkonservasi dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Maritim, Laut, dan Samudera untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Indikator-indikator pada Tujuan 14 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 14.2.1(a) : Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut.
2. Indikator 14.2.1(b) : Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
3. Indikator 14.3.1 : Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.
4. Indikator 14.5.1* : Jumlah luas kawasan konservasi perairan.
5. Indikator 14.6.1 : Persentase kepatuhan pelaku usaha.

Indikator-indikator pada Tujuan 14 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 14.1.1 : Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung.
2. Indikator 14.4.1* : Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.
3. Indikator 14.7.1 : Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.

Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Indikator-indikator pada Tujuan 15 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 15.2.1(c) : Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2. Indikator 15.7.1(a) : Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.

Indikator-indikator pada Tujuan 15 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 15.1.1 : Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan.
2. Indikator 15.2.1 : Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
3. Indikator 15.2.1(b) : Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.
4. Indikator 15.3.1 : Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.
5. Indikator 15.3.1(a) : Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
6. Indikator 15.5.1* : Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.



7. Indikator 15.9.1(a) : Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Indikator-indikator pada Tujuan 16 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 16.1.1(a) : Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
2. Indikator 16.1.2(a) : Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
3. Indikator 16.1.3(a) : Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
4. Indikator 16.1.4(a) : Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
5. Indikator 16.2.1(a) : Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
6. Indikator 16.2.1(b) : Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
7. Indikator 16.2.2 : Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.
8. Indikator 16.2.3 : Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
9. Indikator 16.2.3(a) : Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
10. Indikator 16.3.1(a) : Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.
11. Indikator 16.3.1(b) : Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.
12. Indikator 16.3.1(c) : Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.
13. Indikator 16.3.2(a) : Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.
14. Indikator 16.4.1(a) : Proporsi senjata api dan senjata ringan yang disita, yang terdaftar dan terlacak, yang sesuai dengan standar internasional dan ketentuan hukum.
15. Indikator 16.6.1(a) : Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
16. Indikator 16.6.1(b) : Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
17. Indikator 16.6.1(c) : Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.
18. Indikator 16.7.2(a) : Indeks Lembaga Demokrasi.
19. Indikator 16.7.2(b) : Indeks Kebebasan Sipil.
20. Indikator 16.7.2(c) : Indeks Hak-Hak Politik.



21. Indikator 16.9.1(b) : Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
22. Indikator 16.10.1(b) : Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
23. Indikator 16.10.2(b) : Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.

Indikator-indikator pada Tujuan 16 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi :

1. Indikator 16.5.1(a) : Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)..

Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Indikator-indikator pada Tujuan 17 yang telah mencapai target atau diproyeksikan mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 17.6.2(a) : Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK).
2. Indikator 17.8.1(a) : Proporsi individu yang menggunakan Internet.

Indikator-indikator pada Tujuan 17 yang belum mencapai target atau diproyeksikan belum mencapai target nasional meliputi:

1. Indikator 17.1.1(a) : Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB

Kontribusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pihak Terkait Lainnya

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai TPB tentunya akan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Tidak semuanya dapat diselesaikan di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk itulah diperlukan kontribusi dari pemangku kepentingan secara sinergis dalam suatu kemitraan multi-stakeholder. Beberapa bentuk dukungan dan kontribusi yang diharapkan dari pemangku kepentingan sebagaimana **Tabel 1**.

Tabel 1. Dukungan dan kontribusi pemangku kepentingan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Klungkung

Pemangku Kepentingan	Peran/Kontribusi
Tujuan 1. MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DI MANA PUN	
KEMENSOS	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar • Pembayaran premi peserta Penerima Bantuan Iuran peserta jaminan kesehatan melalui SJSN • Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan pemulihan korban bencana • Dukungan perlindungan sosial korban bencana
KEMENKES	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi dan kebijakan jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan • Pendataan kepesertaan jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan • Bantaun operasional kesehatan
KEMENAKER	Regulasi dan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan
BKKBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga • Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga



Pemangku Kepentingan	Peran/Kontribusi
KEMENPUPR	Dukungan layanan infrastruktur permukiman dan perumahan (air minum, pengentasan permukiman kumuh perkotaan, fasilitas sanitasi masyarakat secara komunal)
KEMENDIKBUD	Bantuan bagi siswa miskin
BNPB	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kapasitas daerah dan komunitas dalam penanggulangan bencana• Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kelembagaan untuk penanggulangan bencana• Dukungan manajemen dan akuntabilitas pelaksanaan teknis penanggulangan bencana
BMKG	<ul style="list-style-type: none">• Peringatan dini bencana
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none">• Regulasi dan Kebijakan perlindungan ketenagakerjaan• Operasional SMA/SMK
LSM	<ul style="list-style-type: none">• Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penanggulangan bencana• Membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana• Peningkatan pembinaan dan pendampingan dalam penanggulangan kemiskinan
PERGURUAN TINGGI	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pembinaan dan pendampingan melalui pengabdian masyarakat• Peningkatan pembinaan dan pendampingan melalui pengabdian masyarakat
Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none">• Membayar iuran kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan
Tujuan 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	
KEMENKES	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan perbaikan gizi masyarakat• Pembinaan kesehatan bayi, anak dan remaja• Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi• Bantuan pemberian makanan tambahan dan Tablet Tambahan Darah• Sosialisasi Pola Pangan Harapan yang mendukung diversifikasi konsumsi pangan
KEMENTAN	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat• Pengembangan kawasan rumah pangan lestari• Pengembangan usaha pangan masyarakat• Pengembangan lumbung pangan• Regulasi dan Kebijakan tata niaga hasil pertanian• Bantuan alat dan mesin pertanian• Bantuan penyediaan benih• Penyaluran pupuk bersubsidi• Penangkaran/fasilitasi penyediaan benih unggul bermutu• Dukungan melestarikan serta upaya pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) untuk sapi bali di Nusa Penida yang ditetapkan sebagai Wilayah Sumber Bibit sapi bali
KKP	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan kampanye/Gerakan Gemar Makan Ikan
KEMENTERIAN ATR/BPN	<ul style="list-style-type: none">• Regulasi dan kebijakan perlindungan lahan pertanian• Pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
PERGURUAN TINGGI	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pembinaan dan pendampingan petani melalui pengabdian masyarakat• Kerjasama penelitian komoditas pertanian unggul dan peningkatan produktivitas• Kerjasama penelitian benih unggul
Tujuan 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA	
KEMENKES	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi• Pembinaan kesehatan bayi, anak dan remaja• Bantuan peralatan untuk penanganan penyakit tidak menular• Rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika melalui rumah sakit
BNN	<ul style="list-style-type: none">• Rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika melalui klinik
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi dan penyuluhan penanggulangan AIDS/HIV• Rehabilitasi medis korban penyalahgunaan narkotika melalui rumah sakit
LSM	<ul style="list-style-type: none">• Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penanggulangan AIDS/HIV• Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu dan bayi• Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkotika
Tujuan 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA	



Pemangku Kepentingan	Peran/Kontribusi
KEMENDIKBUD	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan gerakan literasi nasional Dukungan metodologi pengajaran Bantuan operasional pelaksanaan kejar paket Kebijakan guru mengajar ganda dalam rangka peningkatan angka melek aksara Bantuan perangkat internet dan computer untuk pembelajaran Pendidikan lanjutan bagi Guru yang belum DIV/S1
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akreditasi SMA/SMK Pengembangan fasilitas/infrastruktur/sarana dan prasarana SMA/SMK Peningkatan akses pendidikan SMA/SMK Peningkatan kualitas guru SMA/SMK
Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> CSR untuk membiayai relawan mengajar dalam rangka peningkatan angka melek aksara
Tujuan 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN	
KPPPA	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan jejaring pengarusutamaan gender
BKKBN	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Gerakan ber-KB Penyediaan KB kit
LSM	<ul style="list-style-type: none"> Advokasi kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
Tujuan 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN MANAJEMEN AIR DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA	
KEMENPUPR	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan layanan infrastruktur penyediaan air bersih Dukungan layanan infrastruktur permukiman dan perumahan (air minum, pengentasan permukiman kumuh perkotaan, fasilitas sanitasi masyarakat secara komunal) Pembangunan IPAL sistem terpusat skala kawasan
KEMENPUPR/BWS Bali Penida	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan perlindungan mata air
KKP	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan layanan infrastruktur penyediaan air bersih di pulau-pulau kecil
KEMENKES	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
KLHK/BPDASHL Unda Anyar	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penguatan jaringan informasi sumber daya air di Satuan Wilayah Pengelolaan Sungai Pemulihan kesehatan DAS
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan IPLT di Kecamatan Nusa Penida Perizinan pemanfaatan air tanah Pengendalian dan penegakan hukum pemanfaatan air tanah
Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Pilot project pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian
PERGURUAN TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan hutan desa Rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan lindung
Tujuan 7. MENJAMIN AKSES TERHADAP ENERGI YANG TERJANGKAU, DAPAT DIANDALKAN, BERKELANJUTAN DAN MODERN BAGI SEMUA	
PLN	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pembangkit listrik sistem terisolasi di pulau-pulau kecil
KEMENTERIAN ESDM/PLN	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pembangkit tenaga listrik baru dan terbarukan (PLTS, PLTB, PLTAL) di pulau-pulau kecil
Tujuan 8. MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, PENYERAPAN TENAGA KERJA PENUH DAN PRODUKTIF SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA	
KUMKM	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi akses permodalan/layanan keuangan bagi koperasi, menengah, usaha kecil, dan mikro
KEMENAKER	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kewirausahaan mandiri Program padat karya Fasilitasi pelatihan tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja



Pemangku Kepentingan	Peran/Kontribusi
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pelatihan keterampilan bagi pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja • Fasilitasi penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan • Fasilitasi perlindungan tenaga kerja
KEMENPAR	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional • Fasilitasi penetrasi pemasaran pariwisata di negara-negara pasar pariwisata utama Indonesia • Pelibatan pemerintah kabupaten dalam event promosi pariwisata nasional
Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas K3
BANK BUMN DAN SWASTA NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Pendirian kantor cabang bank dan ATM umum di Kawasan Pariwisata Nusa Penida
Tujuan 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKETAHANAN Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	
KEMENHUB	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Gunaksa • Perizinan dan bantuan pembangunan pelabuhan baru : Bias Munjul, Sampalan/Nusa Penida dan Kusamba • Perizinan dan bantuan pembangunan helipad di pulau-pulau kecil • Kajian pembangunan airstrip di pulau-pulau kecil
KEMENPUPR	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pembangunan jalan lingkar Nusa Penida • Bantuan pembangunan jalan akses Pelabuhan Gunaksa
KEMENPERIN	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah • Fasilitasi pelatihan industri berbasis kompetensi • Fasilitasi pemagangan industri • Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri • Fasilitasi bursa kerja dan penempatan kerja • Fasilitasi standarisasi industri bagi perusahaan industri kecil dan menengah • Fasilitasi permodalan bagi IKM
KEMENKEU	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan kredit IKM
PERBANKAN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran kredit IKM
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam dan Di Antara Negara-Negara	
KEMENDES	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan desa mandiri
KEMENSOS	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bagi penyandang difabilitas
KEMENSOS	<ul style="list-style-type: none"> • Program Keluarga Harapan • Penyediaan beras sejahtera • Penyediaan alat-alat bagi disabilitas • Bantuan sembako untuk lansia miskin • Bantaun terhadap LK3 • Fasilitasi penguatan dan pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama • Bantuan layanan sosial bagi keluarga penerima manfaat
Tujuan 11. Mewujudkan Kota-kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	
KEMENDIKBUD	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran cagar budaya • Dukungan teknis dan/atau kepakaran dalam pelestarian cagar budaya • Penetapan cagar budaya nasional
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Cagar Budaya yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia • Dukungan teknis dan/atau kepakaran dalam pelestarian cagar budaya
BNPB	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kajian risiko bencana • Fasilitasi pembentukan dan penguatan kota tangguh bencana • Peningkatan kapasitas peralatan penanggulangan bencana • Penguatan kapasitas personil penanggulangan bencana • Peningkatan kesiapsiagaan bencana di masyarakat • Pengembangan infrastruktur mitigasi bencana



Pemangku Kepentingan	Peran/Kontribusi
BMKG	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan kualitas udara
Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • CSR fasilitas pengelolaan sampah • Pengembangan 3R sampah
LSM	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan 3R sampah
PERGURUAN TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam pengkajian cagar budaya • Penelitian pengembangan cagar budaya
Tujuan 12. MENJAMIN KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN	
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan penataan lingkungan perusahaan • Pembinaan Proper • Fasilitasi fasilitas pengelolaan limbah B3 • Fasilitasi penyediaan fasilitas/sarana pengelolaan persampahan terpadu • Bimtek penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML)
PERGURUAN TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian 3R sampah dan pengelolaan sampah yang efektif • Pembinaan pengelolaan sampah melalui pengabdian masyarakat
LSM	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan pengelolaan sampah di masyarakat • KIE pengelolaan sampah
Dunia usaha	<ul style="list-style-type: none"> • CSR penyediaan fasilitas pengelolaan sampah
Tujuan 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA	
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyusunan dokumen Adaptasi Perubahan Iklim
Tujuan 14. MENGONSERVASI DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MARITIM, LAUT, DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN	
KKP	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pemberdayaan nelayan
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan sampah plastik di laut • Penyusunan Indeks Eutrofikasi Pesisir
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat penetapan Perda Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Pengendalian pemanfaatan ruang laut
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan kualitas air laut • Dukungan pemberdayaan nelayan • Pengawasan sumber daya ikan • Pengelolaan KKP Nusa Penida secara efektif
Tujuan 15. MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	
KLHK/BPDASHL Uda Anyar	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian, data dan fasilitasi perencanaan penanganan lahan kritis
BKSDA BALI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelepasliaran jalak bali di Nusa Penida • Monitoring dan pelaporan perkembangan populasi pelepasliaran jalak bali di Nusa Penida • Kajian populasi kakatua jambul kuning di Nusa Penida • Perlindungan kakatua jambul kuning di Nusa Penida • Fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
PEMPROV	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan penegakan hukum lingkungan hidup • Fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati • Pengelolaan kawasan hutan lindung • Rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan
PERGURUAN TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian populasi dan habitat jalak bali di Nusa Penida • Penelitian populasi dan habitat kakatua jambul kuning di Nusa Penida
LSM	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pelepasliaran jalak bali
Tujuan 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIKAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN	
POLRES Klungkung	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan kekerasan terhadap anak, perkalahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan keamanan



Pemangku Kepentingan	Peran/Kontribusi
	<ul style="list-style-type: none">• Menjaga ketertiban dan keamanan wilayah• Penanggulangan pencegahan konflik sosial
TIM PENAGANGAN KONFLIK SOSIAL (POLRES, KEJARI, PN, KODIM)	<ul style="list-style-type: none">• Penanggulangan konflik sosial
KEJARI KLUNGKUNG	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan kasus hukum
PENGADILAN NEGERI KLUNGKUNG	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan dan pembebasan biaya perkara
KEJARI KLUNGKUNG	<ul style="list-style-type: none">• Pemasyarakatan perilaku anti korupsi
KPU KLUNGKUNG	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan iklim demokrasi
LEMBAGA BANTUAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none">• Bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berhadapan kasus hukum
LSM	<ul style="list-style-type: none">• KIE penanggulangan kekerasan terhadap anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)• Peningkatan iklim demokrasi• Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kebebasan sipil dan hak politik
ORMAS	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kerukunan dan pencegahan konflik sosial

Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan kondisi pencapaian TPB selanjutnya dilakukan analisis proyeksi kondisi pencapaian TPB sebagai dasar dalam perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian TPB. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian TPB disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian TPB. Skenario target pencapaian TPB terdiri atas :

- 1) Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target TPB pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional (**Tabel 2**).
- 2) Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target TPB pada posisi yang belum tercapainya target yang ditetapkan secara nasional (**Tabel 3**).



Tabel 2. Alternatif Proyeksi Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tanpa Upaya Tambahan

Tujuan 1

MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DI MANA PUN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 1.3										
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan										
1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.3.1(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019	2017 (3283 RT)	4127	3780	4699	4548	4348	4190	4000	Dinas Sosial
Target 1.4										
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro										
1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%.	2020 (106,20%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.4.1(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.									
1.4.1(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	2020 (84,00%)	87,00	84,40	84,00	90,18	90,61	91,04	94,05	Dinas PMD PP-KB
1.4.1(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	2020 (98,25%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.4.1(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	2020 (98,25%)	93,80	97,70	98,25	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.4.1(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78%.	2020 (98,90%)	99,21	99,04	98,90	98,96	99,26	99,56	101,67	Dinas Pendidikan
1.4.1(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2%.	2020 (98,90%)	99,21	99,04	98,90	101,92	103,93	105,93	119,98	Dinas Pendidikan
1.4.1(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	2020 (93,00%)	90,00	91,00	93,00	93,96	94,54	95,12	98,02	Dinas Pendidikan
1.4.1(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana										
1.5.1(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah	2017 (Belum)	Kajian Risiko	Penyusunan RAD	Mantap	Mantap	Mantap	Mantap	Mantap	BPBD
1.5.1(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu	2017 (67,04)	67,22	67,22	69,26	71,48	73,70	75,93	91,48	BPBD
1.5.1(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu	2017 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	BPBD

Tujuan 2

MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun										
2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17%.	2020 (4,7%)	5,2	5,0	4,7	4,29	3,83	3,36	1,97	Dinas Kesehatan
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	-	2020 (Nihil)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.1.2(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 %.	2020 (Nihil)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula										
2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28%.	2020 (7,3%)	16,6	5,57	7,3	7,96	6,64	5,33	0,00	Dinas Kesehatan
2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	-	2020 (2,60%)	3,90	4,20	2,60	2,27	1,62	0,97	0,00	Dinas Kesehatan
2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28%	2017 (3,65%)	2,91	2,49	2,07	1,65	1,23	0,81	0,39	Dinas Kesehatan
2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun 2019	2020 (71,10%)	75,60	72,00	71,10	74,18	75,62	77,06	87,15	Dinas Kesehatan
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian										
2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (Juta Rupiah)	-	2020 (43,36)	53,09	51,31	43,36	52,64	54,35	56,07	68,06	Dinas Pertanian
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan										
2.4.1 Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan	2017 Sudah kajian	Peninjauan RTRW	Revisi RTRW	Legislasi Revisi RTRW	Penetapan	Penetapan	Penetapan	Penetapan	Dinas PUPR
Target 2.5 Mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional										
2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui	- Target Daerah : Tingkat risiko ternak sapi = aman (perbandingan jantan dan betina produktif : 20:40)	2017 (Aman)	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman	Aman	Dinas Pertanian



Tujuan 3

MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup										
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306	2020 (72,90)	140,79	187,80	72,90	43,65	36,83	30	25	Dinas Kesehatan
3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85%.	2020 (106,2%)	107,20	107,20	106,20	110,14	112,36	114,59	130,17	Dinas Kesehatan
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000										
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24	2020 (7,7)	9,86	5,63	7,7	7,2	7,0	6,8	5,3	Dinas Kesehatan
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	-	2020 (2,60)	4,60	3,40	2,60	2,11	1,82	1,52	0	Dinas Kesehatan
3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	-	2020 (5,50)	8,45	4,50	5,50	6,11	5,70	5,28	2,39	Dinas Kesehatan
3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% Target Daerah :	2020 (Sudah tercapai 80% imunisasi dasar)	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Dinas Kesehatan



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Tercapainya 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	lengkap pada bayi								
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya										
3.3.2(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245	2020 (63,92)	60,01	68,68	63,92	44,95	42,46	39,97	22,57	Dinas Kesehatan
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	-	2020 (0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan
3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300	2020 Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Dinas Kesehatan
3.3.4 Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk	-	2020 (0)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.3.4(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	-	2020 Dilakukan deteksi dini	Deteksi dini	Deteksi dini	Deteksi dini	Deteksi dini	Deteksi dini	Deteksi dini	Deteksi dini	Dinas Kesehatan
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Target Daerah : Jumlah penyandang penyakit kusta yang diintervensi	2020 (0,10)	0,67	0,95	0,1	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.4.1(b) Prevalensi tekanan darah tinggi	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3%.	2020 (20,0)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Dinas Kesehatan
3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	-	2017 (5)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
3.4.2(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Target Daerah : Meningkatnya Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	2020 (9)	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Kesehatan
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan										
3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	-	2020 (Nihil)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas										
3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas	2020 (25)	9	25	25	19	17	16	7	
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional										
3.7.1(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66%.	2020 (84,00%)	87,00	84,40	84,00	90,18	90,61	91,04	94,05	Dinas PMD



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.7.1(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	-	2017 (42,67%)	45,17	46,15	47,14	48,12	49,10	50,09	56,98	Dinas PMD
3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38	2017 (10)	10	10	10	10	10	10	10	Dinas PMD
3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28	2020 (2,2)	2,1	2,1	2,1	1,90	1,79	1,68	0,89	Dinas PMD
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang										
3.8.1(a) Unmet need pelayanan kesehatan	Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91%.	2020 (1,10%)	0,74	1,20	1,10	0,88	0,81	0,74	0,24	Dinas Kesehatan
3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95%.	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah										
3.9.1 Angka kematian akibat polusi udara ambien	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9.2 Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	-	0	0	0	0	0	0	0	0	



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.9.3 Angka kematian akibat keracunan	-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan 4

MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif										
4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak kelas 4 yang mencapai standar minimum membaca	2020 (96,12%)	95,95	96,01	96,12	97,86	98,64	99,42	100	Dinas Pendidikan
	Proporsi anak kelas 4 yang mencapai standar minimum matematika	2020 (92,64%)	92,66	92,54	92,64	94,91	95,88	96,85	100	Dinas Pendidikan
	Proporsi anak kelas 6 yang mencapai standar minimum membaca	2020 (97,45%)	97,58	97,50	97,45	97,50	97,60	97,70	100	Dinas Pendidikan
	Proporsi anak kelas 6 yang mencapai standar minimum matematika	2020 (92,30)	92,54	92,60	92,30	94,47	95,21	95,95	100	Dinas Pendidikan
	Proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar minimum membaca	2020 (71,96%)	71,94	72,00	71,96	72,09	72,42	72,74	75,03	Dinas Pendidikan
4.1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2%.	2020 (100%)	97,79	98,50	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81%.	2020 (90,90%)	81,81	86,36	90,90	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
4.1.1(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94%.	2020 (98,21%)	106,56	95,53	98,21	106,73	108,88	111,04	126,12	Dinas Pendidikan
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar										
4.2.1(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2%.	ND								Belum ada data
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan										
4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	-	2017 (17,54%)	25	35	45	60	70	75	85	Dinas Kominfo
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat;(3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki laki SD/MI/sederajat	2020 (98,90)	90,20	99,04	98,90	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat	2020 (90,18)	90,13	90,28	90,18	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/sederajat	2020 (77,38)	72,41	77,49	77,38	80	85	90	100	Dinas Pendidikan
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki diperguruan Tinggi	2017 (118,63)	110,48	96,96	97,37	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi										
4.6.1(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-24 tahun pada tahun 2019	2020 (100%)	100	99,87	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019	2020 (98,18%)	95,71	97,25	98,18	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua										
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai	Listrik – semua tingkatan	100	100	100	100	100	100	100		



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).										

Tujuan 5

MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun										
5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 Target Daerah : Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	2020 (1)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial P3A
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya										
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional)	-	2017 (0,01%)	0,01	0,01	0,00	0	0	0	0	Dinas Sosial P3A



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir										
5.2.1(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019	2017 (0,24)	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,06	0	Dinas Sosial P3A
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	-	2017 (0,003)	0,003	0,002	0,002	0,001	0,001	0,000	0,000	Dinas Sosial P3A
5.5.2(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70%.	2017 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial P3A
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan										
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	-	ND								
5.3.1(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun	2017 (30,3)	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	Dinas Sosial P3A
5.3.1(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun	ND								



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 5.4 Mengenali dan Menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional										
5.4.1* Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi	-	ND								
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan Kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat										
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (%)	2017 (16,67%)	16,67	30	30	30	30	30		Dinas Sosial P3A
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	2017 (6,25%)	6,25	30	30	30	30	30		Dinas Sosial P3A
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut										
5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual,	-	ND								



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi										
5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9%.	2020 (4,5%)	3,8	4,7	4,5	4,2	4,0	3,8	2,0	Dinas PMD
5.6.1(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85%.	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100		Dinas PMD

Tujuan 6

MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN MANAJEMEN AIR DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua										
6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%.	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
6.1.1(C) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	-	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan										
6.2.1(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	-	2020 (100%)	92,25	100	100	100	100	100	100	
6.2.1(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100%.	2020 (98,25%)	93,80	98,25	98,25	100	100	100	100	Dinas PUPR
6.2.1(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019	2020 (47 desa/kel)	33	43	47	59	59	59	59	Dinas Kesehatan
6.2.1(d) Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	-	2020 (47 desa/kel)	33	43	47	59	59	59	59	Dinas Kesehatan
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global										
6.3.2(a) Kualitas air danau	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai									Tidak ada danau



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
6.3.2(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II	2020 (Kelas II)	Kelas II	Kelas II	Kelas II	Kelas II	Kelas II	Kelas II	Kelas II	Dinas LHP
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air										
6.4.1(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif Target Daerah : Perda Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah di tingkat Provinsi	2020 (0)	0	0	1	1	1	1	1	Dinas LHP
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat										
6.5.1(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	2020 (47 DAS)	47	47	47	47	47	47	47	Dinas PUPR
6.5.1(b)	Updating dan revitalisasi stasiun hidrologi dan klimatologi di 8	2020 (7)	7	7	7	7	7	7	7	Dinas PUPR



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Wilayah Sungai dan Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai									
6.5.1(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai	2020 (47)	47	47	47	47	47	47	47	Dinas PUPR
6.5.1(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seluas 12,7 Juta Ha	2020 (Nihil)	0	0	0	0	0	0	0	Dinas LHP
6.5.1(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai Target Daerah : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai berbasis DAS	2017 (3)	3	3	3	3	3	3	3	Dinas LHP
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau										
6.6.1(a) Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2019									Tidak ada danau
6.6.1(b) Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Meningkatnya 15 danau yang pendangkalannya kurang dari 1% pada tahun 2019									Tidak ada danau



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
6.6.1© Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya	Meningkatnya danau yang menurun tingkat erosinya menjadi 15 danau pada tahun 2019								Tidak ada danau	

Tujuan 7

MENJAMIN AKSES TERHADAP ENERGI YANG TERJANGKAU, DAPAT DIANDALKAN, BERKELANJUTAN DAN MODERN BAGI SEMUA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern										
7.1.1* Rasio elektrifikasi	Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019	2020 (100)	100	100	100	100	100	100	100	
7.1.1(c) Rasio penggunaan gas rumah tangga	-	2019 (71,83%)	74,95	71,83	78,40	81,39	84,39	87,38	100	



Tujuan 8

MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, PENYERAPAN TENAGA KERJA PENUH DAN PRODUKTIF SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 8.3 Menganalisis kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan										
8.3.1 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Laki-laki	2020 (6,54%)	13,66	8,26	6,54	8,41	8,05	7,70	5,25	Disnaker
	Perempuan	2020 (1,02%)	3,23	2,21	1,02	1,68	1,55	1,42	0,49	Disnaker
8.3.1(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Target Daerah : Menurunnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	2020 (2,39%)	4,47	0,59	2,39	2,76	3,03	3,30	5,17	Disnaker
8.3.1(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019	2017 (54,73%)	57,64	59,60	62,16	64,42	66,68	68,94	84,76	Dinas Koperasi UKM
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya										
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja		2020 (2,36 juta/bulan)		2,58	2,65	2,75	3,00	3,25	4,50	Disnaker
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun	0,94	0,59	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Target Daerah : Tingkat pengangguran terbuka									
	Tingkat pengangguran terbuka laki-laki	1,32	0,62	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00		



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Tingkat pengangguran terbuka perempuan	0,52	0,79	0,57	0,35	0,13	0,00	0,00		
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya										
8.8.1 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran	Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat	2020 (0)	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker
8.8.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	-	2020 (783)	612	739	783	800	800	800	900	Disnaker
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua										
8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019	2017 (29)	29	30	30	31	31	32		Dinas Koperasi UKM
8.10.1(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	-	2017 (46,39%)	47,67	48,96	50,24	51,53	52,38	54,00		Dinas Koperasi UKM
8.10.1(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	-	3153 (1747 & 6580)	3000	2800	2600	2400	2200	2000		



Tujuan 9

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKETAHANAN Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD					Proyeksi	Keterangan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2030
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua										
9.1.2 Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	Jumlah penumpang transportasi darat	2020 (173.720)	454.220	474.300	173.720	217.150	249.720	287.180		Dishub
	Jumlah penumpang datang transportasi laut	2020 (649.501)	1.775.467	2.97.167	649.501	1.709.635	1.871.232	2.036.426	3.182.008	Dishub
	Jumlah penumpang berangkat transportasi laut	2020 (544.322)	1.737.831	2.134.353	544.322	1.649.663	1.802.670	1.955.677	3.026.726	Dishub
	Jumlah muat barang transportasi laut (Ton)	2020 (63,61)	62,24	85,53	63,61	132,87	135,56	147,26	229,14	Dishub
	Jumlah bongkar barang transportasi laut (Ton)	2020 (67,82)	72,92	159,20	67,82	84,30	91,70	99,10	150,89	Dishub
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020										
9.c.1(a) Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.	-	2020 (72,23%)	65,05	70,32	72,33	78,63	83,73	88,93	100	Diskominfo
9.c.1(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	-	2020 (57,37%)	38,29	40,67	53,37	62,27	70,66	79,05	100	Diskominfo



Tujuan 10

MENGURANGI KESENJANGAN DI DALAM DAN DIANTARA NEGARA-NEGARA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional										
10.1.1(b) Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 80 kabupaten pada tahun 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada daerah tertinggal
10.1.1(c) Jumlah desa tertinggal	Berkurangnya Desa Tertinggal sebanyak 5.000 desa									Tidak ada desa tertinggal
10.1.1(d) Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Desa Mandiri paling sedikit sebanyak 2.000 desa	2020 (35 desa)	22	27	35	53	53	53	53	Dinas PMD
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya										
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	-	2020 (17,85%)	17,50	17,99	17,85	17,33	16,92	16,51	13,65	Dinas Sosial
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
10.3.1 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia	-	2020 (0)	0	0	0	0	0	0		Dinas Sosial
10.3.1(a) Indeks Kebebasan Sipil	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019	2020 (96,86)	94,72	90,60	96,86	95,39	95,65	95,91	97,73	
10.3.1(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	-	2020 (0)	0	0	0	0	0	0	0	
10.3.1(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	-	2020 (0)	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan 11

MEWUJUDKAN KOTA-KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh										
11.1.1(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	2020 (98,25%)	93,80	95,60	98,25	100	100	100	100	Dinas PUPR



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua										
11.2.1(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019	2020 (25%)	25	25	25	25	25	75	100	Dishub
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia										
11.4.1 Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).	-	ND								
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
11.5.1(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience) Target Daerah : Kota Semarapura Tangguh Bencana	2020 (1)	1	1	1	1	1	1	1	BPBD
11.5.1(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	2020 (1)	1	1	1	1	1	1	1	BPBD
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas										
11.7.2(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	-	2017 (0,014%)	0	0	0	0	0	0	0	



Tujuan 14

MENGKONSERVASI DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MARITIM, LAUT, DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya										
14.2.1(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut	Target Daerah : Perda RZWP-3-K	2020 (1)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
14.2.1(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan melalui ketersediaan kebijakan, kerangka hukum, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional, serta terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan hingga tahun 2019	2020 (1)	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Target 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan										
14.3.1 Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai	-	2020 (7,5-8,5)	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5	7,5-8,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
14.5.1 Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2019	2020 (20.057,2 ha)	20.057,2	20.057,2	20.057,2	20.057,2	20.057,2	20.057,2	20.057,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization										
14.6.1 Persentase kepatuhan pelaku usaha	Terkendalinya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Tujuan 15

MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global											
15.2.1(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019	-	--	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada hutan konservasi
15.2.1(b) Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019	-	--	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada IUPHHK-RE
15.2.1(c) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	2020 (1)	1	1	1	1	1	1	1		Dinas LHP
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal											
15.7.1(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Meningkatnya persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar 5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2019 Target Daerah :	2020 (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas LHP



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21									
15.7.1(b) Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Lembaga Konservasi

Tujuan 16

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun										
16.1.1(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas	2020 (0)	0	0	0	0	0	0	0	
16.1.2(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	-	2020 (0)	0	0	0	0	0	0	0	
16.1.3(a)	-	2020 (0,002%)	0	0	0	0	0	0	0	



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir										
16.1.4(a) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	-	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak										
16.2.1(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	-	2020 (0%)	0	0	0	0	0	0	0	
16.2.1(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019	2017 (0)	0	0	0	0	0	0	0	
16.2.2 Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	-	2020 (0)	0	0	0	0	0	0	0	
16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	-	2020 (0%)	0	0	0	0	0	0	0	
16.2.3(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	-	2020 (0%)	0	0	0	0	0	0	0	



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua										
16.3.1(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	-	2017 (0,014%)	0	0	0	0	0	0	0	
16.3.1(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019. Target Daerah : Persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum litigasi dan non litigasi memperoleh bantuan	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	
16.3.1(c) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan pada tahun 2019: 55.665 perkara; pembebasan biaya perkara pada tahun 2019 Target Daerah : Persentase masyarakat miskin yang mengalami peradilan dilayani melalui sidang di luar Gedung pengadilan dan dibebaskan biaya perkara	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
16.6.1(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	2020 (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
16.6.1(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019	2020 (B)	B	B	B	BB	BB	BB	A	
16.6.1(c) Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	Meningkatnya penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019	2020 <i>E-procurement</i>	<i>E-procurement</i>	<i>E-procurement</i>	<i>E-procurement</i>	<i>E-procurement</i>	<i>E-procurement</i>	<i>E-procurement</i>	<i>E-procurement</i>	
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan										
16.7.2(a) Indeks Lembaga Demokrasi	Meningkatnya Indeks Lembaga Demokrasi menjadi 71 pada tahun 2019	2020 (66,90)	89,55	90,42	66,90	80,32	81,03	81,73	86,68	
16.7.2(b) Indeks Kebebasan Sipil	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019	2020 (96,86)	94,72	90,60	96,86	95,39	95,65	95,91	97,73	
16.7.2(c) Indeks Hak-Hak Politik	Meningkatnya Indeks Hak-hak Politik menjadi 68 pada tahun 2019	2020 (69,07)	68,08	68,39	69,07	72,66	74,13	75,59	85,86	
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran										
16.9.1(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019	2019 (97,42%)	93,29	97,42	100	100	100	100	100	



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 16.10										
Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional										
16.10.1(a) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM	2017 (16)	15	14	13	12	11	10	7	
16.10.1(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM	2017 (1)	1	1	1	1	1	1	1	
16.10.2(b) Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	



Tujuan 17

MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.2(a) Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK)	Tersedianya jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota yang menjangkau 100% kabupaten/kota pada tahun 2019	2020 (100%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan Internet	-	2020 (57,37%)	38,29	40,67	57,37	62,27	70,66	79,05	100	Dinas Kominfo



Tabel 3. Alternatif Proyeksi Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Upaya Tambahan

Tujuan 1

MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN DI MANA PUN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan										
1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8%	2020 (4,84%)	5,86	5,40	4,84	4,18	3,56	3,00	2,00	Lintas OPD
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan										
1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya kepesertaan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal	2017 (15,48%)	6,60	8,93	13,94	9,31	10,05	12,15	40,50	Disnaker
1.3.1(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 menjadi 17,12%.	2017 (17,03%)	23,02	26,02	29,70	100	100	100	100	Dinas Sosial
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro										
1.4.1(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah	2017 (3,82%)	2,70	1,81	1,25	0,86	0,58	0	0	Dinas PUPR
1.4.1(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%	2020 (77,38)	72,41	77,49	77,38	88,56	90,37	92,19	95,81	Dinas Pendidikan
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana										
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Menurunnya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	2017 (3,33)	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
1.5.1(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 Target Daerah : Meningkatnya jumlah absolut Pendidikan layanan khusus bencana %)	2017 (67,04%)	67,22	67,22	69,26	71,48	73,70	75,93	100	BPBD
1.5.1(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota	2019 (134,52)	163,39	134,52	123,69	112,45	101,22	89,98	22,56	BPBD



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
1.5.2(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Target Daerah : Menurunnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Rp. Juta)	2017 (715,25)	<715,25	<715,25	<715,25	<715,25	<715,25	<715,25	<715,25	BPBD
1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Target Daerah : Tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana : 1. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB) 2. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) 3. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) 4. Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API)	2017 (Belum)	Belum	Belum	Jakstra PB, RPBD & RAD PRB	Jakstra PB, RPBD, RAD PRB & RAD API	Jakstra PB, RPBD, RAD PRB & RAD API	Jakstra PB, RPBD, RAD PRB & RAD API	Jakstra PB, RPBD, RAD PRB & RAD API	BPBD



Tujuan 2

MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula										
2.2.2(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5	2020 (88,0)	85,4	86,0	88,0	96,6	96,75	96,90	97,95	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019	2017 (48,0)	45,33	35,48	44,35	47,89	49,67	53,22	56	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Target 2.5 Mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional										
2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	Meningkatnya varietas unggul tanaman yang dilepas	2017 (3)	3	5	6	7	9	10	15	Dinas Pertanian
	Meningkatnya bibit unggul ternak yang dilepas	2017 (0)	0	2	2	2	2	2	2	Dinas Pertanian



Tujuan 3

MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya										
3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	-	2020 (0,23)	0,30	0,25	0,23	0,11	0,06	0	0	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan										
3.4.1 Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	-	2017 (124)	110	100	90	80	70	60	30	Dinas Kesehatan
3.4.1(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4%	ND								Belum ada data
3.4.1(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur <18 tahun	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4%.	2018 (23,30)	23,30	21,10	20,00	18,90	16,70	15,00	10,10	Dinas Kesehatan
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan										
3.5.1(a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang	- Target Daerah :	2020 (24)	18	21	24	21	18	15	7	Dinas Kesehatan



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Penyalahguna narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi medis 100%									
3.5.1(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	-	ND								Dinas Kesehatan
3.5.1(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	- Target Daerah : Memiliki kerjasama dengan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA	2020 (Belum)	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kesehatan
3.5.1(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Terkendalnya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02%.	2020 (1,1%)	1,49	1,30	1,10	0,50	0,10	0,02	0,00	Dinas Kesehatan
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 tahun dalam satu tahun terakhir	-	ND								Belum ada data



Tujuan 4

MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif										
4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/ kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar minimum matematika	2020 (51,46%)	51,25	51,06	51,46	52,64	56,12	60,00	70,00	Dinas Pendidikan
4.1.1(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6%.	2020 (61,11%)	50,00	55,55	61,11	70,62	85,00	90,00	100	Dinas Pendidikan
4.1.1(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09%.	2020 (107,88%)	112,83	114,66	107,88	115,00	118,33	120,16	121,99	Dinas Pendidikan
4.1.1(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%.	2020 (93,32%)	87,50	92,83	93,32	101,09	105,04	110,18	115,00	Dinas Pendidikan
4.1.1(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun	2020 (8,13)	7,75	8,12	8,13	8,56	8,98	9,40	10,23	Dinas Pendidikan



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas										
4.3.1(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%.	2020 (93,32%)	87,50	92,83	93,32	101,09	105,04	110,18	115,00	Dinas Pendidikan
4.3.1(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi 36,73 %.	2020 (27,76)	23,50	26,45	27,76	33,38	35,81	38,24	52,79	Dinas Pendidikan
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi										
4.6.1(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1%.	2020 (91,57%)	86,82	87,81	91,57	92,92	94,34	96,47	100	Dinas Pendidikan
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua										
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Internet untuk tujuan pengajaran-SD	47,25	51,47	55,14	58,82	62,50	66,17	69,85	91,91	Dinas Pendidikan
	Internet untuk tujuan pengajaran-SMP	89,47	90,90	90,90	90,90	90,90	95,45	100	100	
	Internet untuk tujuan pengajaran-SMA	47,37	66,67	77,78	88,89	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Komputer untuk tujuan pengajaran-SD	45,00	51,47	58,82	66,17	73,52	80,88	88,23	100	Dinas Pendidikan
	Komputer untuk tujuan pengajaran-SMP	84,21	90,90	90,90	90,90	100	100	100	100	Dinas Pendidikan



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Komputer untuk tujuan pengajaran-SMA	78,95	83,33	94,44	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas-SD	0	4,41	5,80	7,35	8,82	10,29	11,76	25	Dinas Pendidikan
	Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas-SMP	21,05	27,27	31,81	36,36	40,90	45,45	50	75	Dinas Pendidikan
	Infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas-SMA	26,32	27,78	33,33	38,88	44,44	50	55,55	100	Dinas Pendidikan
	Air minum layak-SD	89,5	90,44	91,17	92,64	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Air minum layak-SMP	78,95	81,81	86,36	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Air minum layak-SMA	89,47	94,44	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin-SD	95,5	96,32	97,05	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin-SMP	89,47	95,45	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin-SMA	57,89	66,67	88,89	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	fasilitas cuci tangan-SD	94,0	95,58	97,79	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	fasilitas cuci tangan-SMP	73,68	81,81	90,9	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	fasilitas cuci tangan-SMA	78,95	83,33	88,88	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	TK	18,64	41,67	45,29	46,92	48,01	49,82	51,63	64,31	Dinas Pendidikan
	SD	70,49	58,99	60,19	62,60	63,80	65,01	66,21	72,23	Dinas Pendidikan
	SMP	58,98	59,35	60,83	61,72	83,20	64,69	66,17	76,56	Dinas Pendidikan
	SMA	40,84	42	44	46	48	50	52	66	Dinas Pendidikan

Tujuan 6

MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN MANAJEMEN AIR DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 6.1										
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua										
6.1.1(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m ³ /detik dan penyediaan air baku untuk 60 pulau	2017 (274,30)	289,05	297,51	305,96	314,42	322,87	331,32	390,50	Dinas PUPR
6.1.1(C) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	-	2027 (99,17%)	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
Target 6.2										
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
6.2.1(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	-	2020 (0)	0	0	0	0	0	1	1	Dinas PUPR
6.2.1(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	-	2020 (0)	0	0	0	0	0	10	25	Dinas PUPR
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global										
6.3.1 Proporsi limbah cair yang diolah secara aman	-	2020 (0)	0	0	0	0	0	10	25	Dinas PUPR
6.3.1(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota	2020 (0)	0	0	0	0	0	1	1	Dinas PUPR
6.3.1(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	-	2017 (68,4%)	70,62	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	Dinas PUPR
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air										
6.4.1(b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri	Pemberian insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).	2020 (0)	0	0	0	0	Insentif	Insentif	Insentif	Dinas Pertanian
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau										
6.6.1(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar pada tahun 2019	2020 (0)	0	0	0	851,5	851,5	851,5	851,5	Dinas LHP



Tujuan 7

MENJAMIN AKSES TERHADAP ENERGI YANG TERJANGKAU, DAPAT DIANDALKAN, BERKELANJUTAN DAN MODERN BAGI SEMUA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern										
7.1.1(a) Konsumsi listrik per kapita	Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019 Target Daerah : Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh tahun 2023	2027 (531)	794	873	952	1031	1109	1200	1300	
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global										
7.2.1* Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019 Target Daerah : Bauran energi terbarukan mencapai 5% pada tahun 2023	2020 (0)	0	0	0	4,00	5,79	7,58	20,08	



Tujuan 8

MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, PENYERAPAN TENAGA KERJA PENUH DAN PRODUKTIF SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang										
8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB	-	2020 (-6,35%)	5,34	5,42	-6,35	6,00	6,00	6,00	6,00	Lintas OPD
8.1.1(a) PDRB per kapita	Meningkatnya PDRB per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019	2020 (47,07 juta)	47,45	50,85	47,07	52,08	54,18	56,20	70,62	Lintas OPD
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya										
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019	2020 (-3,97%)	6,56	9,38	-3,97	6,50	6,50	6,50	6,50	Disnaker
Target 8.3 Menganalisis kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan										
8.3.1(a) Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019	2020 (37,43%)	41,22	45,28	37,43	45,06	48,43	51,79	65,00	Disnaker
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka	Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun	2020 (5,42%)	1,41	1,54	5,42	0,80	0,70	0,60	0,20	Disnaker
8.5.2(a) Persentase setengah pengangguran		2019 (24,76%)	15,13	24,76	21,41	20,56	20,14	19,72	17,18	Disnaker
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan										
8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja	2020 (8,69%)	9,52	9,36	8,69	8,67	8,47	8,28	6,91	Disnaker
Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya										
8.7.1 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja	ND								
Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya										
8.8.2 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat	-	ND								



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait										
Target 8.9										
Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal										
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019	2020 (10,33%)	14,50	14,59	10,33	12,00	14,50	15,50	16,50	Dinas Pariwisata
8.9.1(a) Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019	2020 (120.023 orang)	620.928	648.611	120.023	100.000	400.000	600.000	1.000.000	Dinas Pariwisata
8.9.1(b) Jumlah wisatawan nusantara	Target Daerah : Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara >66.000 tahun 2023	2020 (6.370)	101.090	191.179	6.370	10.000	50.000	100.000	200.000	Dinas Pariwisata
8.9.1(c) Jumlah devisa sektor pariwisata	Target Daerah : Meningkatnya jumlah devisa sektor pariwisata >2 Triliun Rupiah tahun 2023	2017 (1,65 T)	1,78	1,81	1,94	2,07	2,18	2,24		Dinas Pariwisata
8.9.1(d) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Target Daerah : Meningkatnya proporsi tenaga kerja pada industri pariwisata >40% tahun 2023	2020 (9,98%)	8,66	11,50	9,98	10,55	12,50	14,00	15,00	Dinas Pariwisata



Tujuan 9

MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKETAHANAN Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua										
9.1.1* Kondisi mantap jalan kabupaten	-	2020 (86,44%)	72,19	86,24	86,44	90,00	95,00	100	100	Dinas PUPR
9.1.2(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019	2020 (1)	1	1	1	1	2	3	3	Dishub
9.1.2(c) Jumlah pelabuhan strategis	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019 Target Daerah : Terbangunnya pelabuhan strategis kabupaten	2020 (0)	0	0	1	2	3	3	3	Dishub
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang										
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB Target Daerah : Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan	2020 (-5,87%)	5,10	5,46	-5,87	7,75	8,21	8,68	9,12	Dinas Koperasi UKM dan Perindag



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB									
9.2.1(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 Target Daerah : Meningkatnya kontribusi industri pengolahan menjadi 11,88% terhadap PDRB pada tahun 2023	2020 (9,57%)	9,29	9,29	9,57	10,05	10,80	11,88	12,06	Dinas Koperasi UKM dan Perindag
9.2.2 Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	-	2020 (14,10%)	15,78	13,71	14,10	14,59	14,72	15,84	15,72	Dinas Koperasi UKM dan Perindag
Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar										
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	-	ND								
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	-	2019 (12,39%)	14,75	12,39	15,00	17,25	18,00	20,00	30,00	Dinas Koperasi UKM dan Perindag
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing										
9.4.1* Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019	ND								



Tujuan 10

MENGURANGI KESENJANGAN DI DALAM DAN DIANTARA NEGARA-NEGARA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
Target 10.1										
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional										
10.1.1* Koefisien Gini	Koefisien Gini pada tahun 2023 menjadi 0,36	2018 (0,3915)	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37	0,36	0,33	
10.1.1(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk	2020 (4,87%)	5,86	5,40	4,87	3,84	3,39	3,00		
Target 10.4										
Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar										
10.4.1 (a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	-	2017 (3,06%)	3,26	3,45	3,64	3,83	4,02	4,21		Dinas Sosial
10.4.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta	2017 (15,48%)	16,85	18,30	19,74	21,19	22,63	24,08		Disnaker



Tujuan 11

MEWUJUDKAN KOTA-KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi	Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2030	
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan										
11.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	-	2017 (3,38)	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
11.5.1(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019	2019 (134,52)	163,39	134,52	134,83	123,59	112,35	101,12	22,46	BPBD
11.5.2(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	-	2017 (715,25)	<715,25	<715,25	<715,25	<715,25	<715,25	<715,25	<715,25	BPBD
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota										
11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019	2017 (38,00)	90	90	90	90	90	90	95	Dinas LHP
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas										
11.7.1 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas	-	2020 (7,57%)	7,57	7,57	7,57	8,81	10,05	11,30	20,00	Dinas LHP



Tujuan 12

MENJAMIN KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan										
12.4.1 Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU	-	2020 (3)	3	5	10	15	20	25		Dinas LHP
12.4.2(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 Target daerah: Jumlah usaha atau kegiatan mengelola Limbah B3	2020 (0)	0	0	0	100	150	200		Dinas LHP
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali										
12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019	2020 (30,52 ton)	5	12	30,52	32,00	34,00	35,00	50,00	Dinas LHP
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
12.6.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019	2017 (0)	0	1	2	3	4	5		Dinas LHP
Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional										
12.7.1(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019	2020 (0)	0	0	0	6	9	15		Dinas LHP
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam										
12.8.1(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	-	2020 (0)	0	0	0	3	4	5		Dinas LHP



Tujuan 13

MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
13.1.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019	2020 (0)	0	0	0	0	0	1	1	Dinas LHP
13.1.2 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	-	2017 (3,38)	0	0	0	0	0	0	0	BPBD
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional										
13.2.1(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Target Daerah : Dokumen RAD Penurunan Emisi GRK	2020 (0)	0	0	0	0	0	1	1	Dinas LHP



Tujuan 14

MENKONSERVASI DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MARITIM, LAUT, DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi										
14.1.1* Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung	Target Daerah : Tersusunnya ICEP dan pelaporan kepadatan sampah plastik terapung	2020 (0)	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya										
14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 6.982.560 ton pada tahun 2019 Target Daerah : Meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 2.750 tahun 2023	2020 (2.384 ton)	1.835	1.743	2.384	2.500	2.650	2.750	3.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Target 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil										
14.7.1 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara- negara	Target daerah : Meningkatnya kontribusi perikanan terhadap PDRB	2020 (9,36%)	9,05	8,75	9,36	9,75	10,25	11,50	12,50	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara										

Tujuan 15

MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya										
15.1.1* Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan	-	2020 (3,33%)	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	Dinas LHP
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.										
15.2.1 Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	- Target Daerah : Menurunnya proporsi lahan kritis dan sangat kritis	2017 (43,53%)	42,65	41,80	40,97	40,15	39,34	38,56	30,00	Dinas LHP
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi										



Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
15.3.1(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019	2017 (0%)	0,87	0,85	0,84	0,82	0,80	0,79	0,70	Dinas LHP
Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah										
15.5.1 Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Meningkatnya 10% populasi 25 jenis satwa terancam punah pada tahun 2019 Target Daerah: Meningkatnya 10% populasi burung jalak bali (<i>Leucopsar rotschildi</i>)	ND								Dinas LHP
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan										
15.9.1 Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Target Daerah : Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	2020 (0)	0	0	0	0	1	1	1	Dinas LHP



Tujuan 16

MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya										
16.5.1(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019	2020 (3,84)	3,66	3,70	3,84	4,00	4,00	4,00	4,00	

Tujuan 17

MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Indikator	Target Nasional	Pencapaian	Alternatif Proyeksi dalam RPJMD						Proyeksi 2030	Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya										
17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun	2020 (2,90%)	2,21	3,27	2,90	3,31	3,58	3,85	5,76	



Isu Strategis, Permasalahan dan Sasaran Strategis Daerah

Berdasarkan alternatif proyeksi kondisi pencapaian TPB tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan selanjutnya dirumuskan isu strategis berupa rumusan isu utama dalam pencapaian TPB, permasalahan berupa tantangan pelaksanaan TPB, dan sasaran strategis daerah berupa kondisi pencapaian TPB berdasarkan isu strategis dan permasalahan. Rumusan isu strategis, permasalahan atau tantangan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan sasaran strategis daerah dalam pencapaian TPB berdasarkan alternatif proyeksi kondisi pencapaian TPB disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Daerah	OPD Penanggung Jawab
Tingkat kemiskinan relatif tinggi walaupun telah berada di atas target nasional	Terpuruknya perekonomian daerah sebagai dampak pandemi COVID-19 tahun 2020	Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 3,0% di tahun 2023	Lintas OPD serta instansi Pemerintah, dan pemangku kepentingan terkait
Jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan masih rendah	Menurunnya BPJS penerima upah yang disebabkan karena menurunnya jumlah perusahaan yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai dampak dari pandemic Covid-19 tahun 2020	Meningkatnya jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan hingga menjadi 12,15% di tahun 2023	Dinas Ketenagakerjaan
Belum seluruhnya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya	Data penyandang disabilitas kelompok miskin dan rentan masih belum valid	Cakupan penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100% pada tahun 2021-2023	Dinas Sosial
Rumah tangga kumuh perkotaan masih tinggi	Terbatasnya kemampuan rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak di perkotaan	Tertanganinya permukiman kumuh hingga rumah tangga kumuh perkotaan menjadi 0% pada tahun 2023	Dinas PUPR
Tingkat risiko bencana masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Ancaman bencana beragam dengan tingkat bahaya berkisar sedang sampai tinggi Tingginya tingkat kerentanan (sosial, ekonomi dan lingkungan) kategori sedang sampai tinggi Kapasitas penanggulangan bencana masih kategori sedang Strategi peningkatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam belum terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya Indeks Risiko Bencana di seluruh kabupaten/kota di Bali hingga di bawah 89,98 di tahun 2023 Tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah di tahun 2023 	BPBD
Kualitas konsumsi pangan masih rendah yang diindikasikan oleh skor Pola	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat keanekaragaman pangan masih rendah Perubahan pola konsumsi mengarah pada 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pola Pangan Harapan menjadi hingga diatas angka 96,90 pada tahun 2023 	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Daerah	OPD Penanggung Jawab
Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan	kegemaran terhadap makanan instan cenderung meningkat <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan ikan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat masih terbatas • Kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan mencapai 53,22 kg/kapita/tahun pada tahun 2023 	
Terancamnya sistem produksi pangan yang berkelanjutan	Tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian	Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam revisi RTRW Kabupaten	Dinas PUPR
Rendahnya produktivitas pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur pengairan/irigasi pertanian masih terbatas • Jumlah pelepasan varietas unggul tanaman masih kecil • Perubahan iklim 	Meningkatnya produktivitas berbagai jenis pangan melalui penerapan praktek pertanian tangguh dan adaptasi terhadap perubahan iklim	Dinas Pertanian
Angka infeksi baru HIV meningkat	Kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS masih rendah	Menurunnya angka infeksi baru HIV menurun hingga menjadi 0 per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV pada tahun 2023	Dinas Kesehatan
Kecenderungan meningkatnya kematian akibat penyakit tidak menular seperti akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku dan pola hidup sehat di kalangan masyarakat belum optimal • Tekanan (<i>stress</i>) di kalangan masyarakat cenderung meningkat 	Menurunnya kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis pada angka sekecil-kecilnya hingga tahun 2023	Dinas Kesehatan
Prevalensi obesitas pada penduduk umur <18 tahun masih tinggi	Perilaku dan pola makan yang tidak sehat	Menurunnya prevalensi obesitas pada penduduk umur <18 tahun menjadi 15,00% pada tahun 2023	Dinas Kesehatan
Prevalensi penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi, informasi dan edukasi penyalahgunaan narkotika masih belum optimal • Pengawasan peredaran gelap narkotika masih kurang efektif • Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku (pedagang dan pemakai) • Modus peredaran dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang • Pergaulan sosial yang tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya penyalahguna narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi medis 100% selama tahun 2019-2023 • Tersedianya kerjasama dengan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika • Terkendalinya jumlah penyalahgunaan narkoba hingga mencapai angka 15 pada tahun 2023 	Dinas Kesehatan
Tingkat kemampuan membaca dan matematika siswa SD masih rendah	Manajemen kurikulum dan pembelajaran belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi anak kelas 4 yang mencapai standar minimum membaca mencapai 100% pada tahun 2023 	Dinas Pendidikan



Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Daerah	OPD Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi anak kelas 4 yang mencapai standar minimum matematika mencapai 100% pada tahun 2023 • Proporsi anak kelas 6 yang mencapai standar minimum membaca mencapai 99,61% tahun 2023 • Proporsi anak kelas 6 yang mencapai standar minimum matematika mencapai 100% tahun 2023 • Proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar minimum membaca mencapai 87,25% pada tahun 2023 • Proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar minimum matematika mencapai 77,70% tahun 2023 	
Angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya kesempatan mendapatkan pendidikan keaksaraan bagi penduduk umur ≥15 tahun yang tidak bersekolah • Rendahnya motivasi mengikuti pendidikan keaksaraan bagi penduduk umur ≥15 tahun yang tidak bersekolah 	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun menjadi 96,47% pada tahun 2023	Dinas Pendidikan
Akses pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA/SMK belum merata yang ditandai oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) yang masih relatif rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan belum merata • Kondisi geografis dan jarak rata-rata sekolah relatif jauh menghambat minat melanjutkan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD diatas 114,09% pada tahun 2019-2023 • Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP diatas 106,94% pada tahun 2019-2023 • Meningkatnya APK SMA/SMK diatas 91,63% pada tahun 2019-2023 	Dinas Pendidikan
Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar dan bahkan tidak pernah sekolah • Rendahnya minat dan kesempatan bagi penduduk di atas 25 tahun untuk mengikuti paket A, B dan C. 	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun mencapai 9,4 tahun pada tahun 2023	Dinas Pendidikan



Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Daerah	OPD Penanggung Jawab
Belum meratanya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Ketersediaan fasilitas PAUD belum merata sampai ke pelosok desa	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi 77,2% pada tahun 2023	Dinas Pendidikan
Kualitas guru pada semua tingkatan pendidik belum merata	Tingkat pendidikan guru sebagian belum memenuhi persyaratan sertifikasi pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik mencapai 51,63% tahun 2023 • Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik mencapai 66,21% tahun 2023 • Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik mencapai 66,17% tahun 2023 • Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik mencapai 52% tahun 2023 	Dinas Pendidikan
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri khususnya untuk Klungkung kepulauan masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air baku di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sangat terbatas • Sumber air baku yang tersedia di Nusa Penida sulit diakses 	• Meningkatnya kapasitas infrastruktur/prasarana air baku di wilayah pulau-pulau kecil mencapai 331,32 liter/detik tahun 2023	Dinas PUPR
Belum meratanya akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Sumber dan jaringan distribusi air minum belum merata	Terpenuhinya akses layanan air minum aman dan berkelanjutan mencapai 100% pada tahun 2021	Dinas PUPR
Belum optimalnya pengelolaan air limbah di perkotaan dan kawasan pariwisata	Belum terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	<ul style="list-style-type: none"> • Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan (kawasan pariwisata) tahun 2023 • Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal sebanyak 5 unit tahun 2023 	Dinas PUPR
Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pengelolaan lumpur tinja	Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah Klungkung kepulauan	Terbangunnya 2 unit IPLT masing-masing di Nusa Lembongan dan Nusa Penida tahun 2023	Dinas PUPR
Belum berkembangnya secara optimal upaya penghematan air pada sektor pertanian, industri dan pariwisata	Pembinaan kepada masyarakat dalam upaya penghematan air melalui inovasi dan/atau teknologi tepat guna yang ada belum optimal	Terbangunnya <i>pilot project</i> berbasis masyarakat penerapan <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i> dalam upaya penghematan air	Dinas Pertanian
Lahan kritis di dalam kawasan hutan masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan yang dapat mempercepat kelangkaan air dan menyebabkan lahan pada DAS rentan kritis • Pengelolaan lahan kurang mempertimbangkan kaidah konservasi • Perubahan iklim 	Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 851,5 ha sampai tahun 2020	Dinas LHP



Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Daerah	OPD Penanggung Jawab
Masih rendahnya konsumsi listrik per kapita	Infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik masih terbatas khususnya di Klungkung kepulauan	Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh tahun 2023	
Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) masih rendah	Pemanfaatan sumber-sumber energi listrik baru dan terbarukan seperti tenaga angin, surya dan arus/gelombang laut untuk pengembangan pembangkit energi listrik terbarukan belum optimal	Meningkatnya bauran energi terbarukan mencapai 7,58% pada tahun 2023	
Kinerja pertumbuhan ekonomi terkontraksi sangat parah sebagai dampak pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata yang merupakan sektor yang paling terdampak pandemi• Dalam jangka pendek, pemulihan ekonomi masih terkendala oleh pandemi COVID-19 yang masih belum dapat dipastikan berakhirnya sehingga masih diterapkannya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan transportasi• Dalam jangka menengah, transformasi ekonomi masih dalam rangka penyeimbangan struktur perekonomian masih terkendala oleh rendahnya nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang ada	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi hingga menjadi 6,00% pada tahun 2023	Lintas Perangkat Daerah
Masih rendahnya PDRB perkapita	Terpuruknya ekonomi karena dampak pandemi covid-19	Meningkatnya PDRB perkapita menjadi 56,20 juta pada tahun 2023	Lintas Perangkat Daerah
Proporsi tenaga kerja formal masih rendah	Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah	Meningkatnya tenaga kerja formal menjadi 51,79% pada tahun 2023	Dinas Ketenagakerjaan
Tingkat pengangguran terbuka meningkat sebagai dampak pandemi COVID-19	Tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata yang merupakan sektor yang paling terdampak pandemi	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 0,60% pada tahun 2023	Dinas Ketenagakerjaan
Persentase setengah pengangguran masih tinggi	Kurangnya akses terhadap pelatihan bagi calon dan tenaga kerja	Menurunnya tingkat setengah pengangguran menjadi 19,72% pada tahun 2023	Dinas Ketenagakerjaan
Kinerja sektor pariwisata menurun sebagai dampak pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none">• Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dalam satu sampai dua tahun ke depan sehingga pembatasan perjalanan wisatawan mancanegara dan nusantara masih diterapkan	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB menjadi di atas 15,50% pada tahun 2023• Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata



Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Daerah	OPD Penanggung Jawab
	<ul style="list-style-type: none"> Adanya varian baru virus corona menyebabkan Pemerintah dan sejumlah negara menerapkan kebijakan yang ketat keluar masuknya warga negara dan warga asing Kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih belum optimal sehingga Pemerintah masih menerapkan sejumlah kebijakan pembatasan orang-orang dalam bepergian 	<p>seiring dengan meredanya pandemi COVID-19 pada tahun 2021-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja menjadi di atas 14% pada tahun 2023 	
Masih tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan jalan belum optimal Sistem drainase jalan yang tidak baik Peningkatan beban yang melebihi beban rencana sehingga umur rencana jalan tidak tercapai 	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten mantap menjadi 100% tahun 2023	Dinas PUPR
Konektivitas angkutan penyeberangan masih rendah antara Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas Pelabuhan Padangbai sebagai sandingan penyeberangan Pelabuhan Mentigi/Nusa Penida sangat terbatas Terhambatnya penyelesaian dermaga penyeberangan Gunaksa 	<ul style="list-style-type: none"> Beroperasinya pelabuhan/dermaga penyeberangan Bias Munjul tahun 20222 Beroperasinya pelabuhan/dermaga penyeberangan Gunaksa (di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali) tahun 2023 	Dinas Perhubungan
Menurunnya laju pertumbuhan industri pengolahan sebagai sektor unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penumbuhan industri baru masih rendah Produktivitas industri pengolahan masih rendah Sentra-sentra IKM belum terbina secara optimal Pembangunan industri belum secara optimal melalui pendekatan terpadu antar sektor terutama dengan sektor pertanian dan pariwisata Pemerataan usaha industri masih rendah karena keterbatasan infrastruktur khususnya di wilayah kepulauan Tingkat penguasaan dan penerapan teknologi tepat guna dan ICT untuk mendukung pembangunan industri kecil dan menengah masih terbatas Akses permodalan usaha bagi IKM masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya laju pertumbuhan industri pengolahan hingga melebihi laju pertumbuhan PDRB Meningkatnya kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah mencapai 11,88% tahun 2023 	Dinas Koperasi UKM dan Perindag



Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Daerah	OPD Penanggung Jawab
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat suku bunga pinjaman bagi IKM masih tinggi Aspek legalitas IKM IKM tidak memiliki tambahan agunan Pengusaha IKM tidak mengetahui prosedur pengajuan kredit Rendahnya kemampuan dalam pembukuan yang profesional. 	Meningkatnya proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit mencapai 20% pada tahun 2023	Dinas Koperasi UKM dan Perindag
Masih tingginya kesenjangan ekonomi antar penduduk/ masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Ketimpangan peluang dalam memperoleh pendapatan karena faktor tingkat pendidikan yang tidak merata Masih tingginya pekerja informal dengan produktivitas rendah Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor Adanya konsentrasi kekayaan pada segelintir elit 	Menurunnya Koefisien Gini pada tahun 2023 menjadi 0,36	
Masih rendahnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah Pengawasan dan pembinaan masih sangat terbatas 	Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 24,08% tahun 2023	Dinas Ketenagakerjaan
Masih rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani	Fasilitas pengelolaan sampah perkotaan (penampungan, pengangkutan dan pengolahan) dan personil masih terbatas	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 90% pada tahun 2022	Dinas LHP
Masih kecilnya proporsi ruang terbuka perkotaan	Terbatasnya lahan milik pemerintah atau lahan publik yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka	Meningkatnya proporsi ruang terbuka perkotaan secara bertahap hingga 11,3% tahun 2023	Dinas LHP
Pengelolaan limbah B3 belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kesadaran usaha/ kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 Lemahnya monitoring dan pembinaan pengelolaan limbah B3 terhadap usaha/ kegiatan yang memperoleh izin lingkungan 	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola secara tepat oleh usaha/kegiatan yang memperoleh izin lingkungan	Dinas LHP
Masih rendahnya timbulan sampah yang didaur ulang	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas/kemampuan masyarakat dalam melakukan daur ulang sampah masih rendah 	Meningkatnya jumlah fasilitas Tempat Olah Sampah Setempat (TOS) hingga	Dinas LHP



Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Terbatasnya dukungan fasilitas daur ulang sampah di tingkat masyarakat	mencapai 38 unit pada tahun 2023	
Kapasitas daerah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih rendah	Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum terlaksana secara terpadu karena belum tersedianya dokumen RAD Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya RAD Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2023	Dinas LHP
Kontribusi perikanan terhadap perekonomian daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan tangkap akibat masih rendah karena kemampuan adaptasi nelayan terhadap perubahan pola migrasi ikan dan ketidakpastian cuaca sebagai dampak dari perubahan iklim • Ditinggalkannya usaha budidaya rumput laut oleh masyarakat di Nusa Penida akibat kegagalan panen dan rendahnya harga rumput laut di tingkat produsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 2.750 ton pada 2023 • Meningkatnya produksi rumput hingga mencapai 50.000 ton pada tahun 2023 	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tingginya tingkat lahan kritis yang belum tertangani yaitu mencapai 43,53% dari luas wilayah yang terkonsentrasi di Kecamatan Nusa Penida	Penanganan lahan kritis belum dilakukan secara terencana dan terpadu	Menurunnya proporsi lahan kritis dan sangat kritis menjadi 38,56% pada tahun 2023	Dinas LHP
Tingginya tingkat lahan kritis di dalam kawasan hutan di Kecamatan Nusa Penida yaitu mencapai 81,21% dari luas total kawasan hutan	Penanganan lahan kritis di dalam kawasan hutan belum dilakukan secara terencana dan terpadu	Meningkatnya penanganan lahan kritis di dalam kawasan hutan mencapai 11,4% pada tahun 2023	Dinas LHP
Kritisnya populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>) sebagai salah satu satwa terancam punah prioritas di Kecamatan Nusa Penida	<ul style="list-style-type: none"> • Belum diketahuinya habitat dan jumlah populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>) yang masih tersisa di Nusa Penida • Tingginya tingkat pemburuan liar terhadap Kakatua Kecil Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>) di masa lalu yang menyebabkan populasi satwa ini sangat terancam keubahannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditetapkannya habitat perlindungan Kakatua Kecil Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>) berbasis masyarakat di Nusa Penida • Meningkatnya 10% populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>) pada tahun 2023 	Dinas LHP
Kecenderungan kemerosotan keanekaragaman hayati khususnya plasma nutfah lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya dokumen Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati • Belum optimalnya pengelolaan Nusa Penida sebagai wilayah sumber bibit sapi bali 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati pada tahun 2021 sebagai pedoman pelestarian keanekaragaman hayati khususnya plasma nutfah sumber pangan lokal 	Dinas LHP dan Dinas Pertanian



Isu Strategis	Permasalahan	Sasaran Strategis Daerah	OPD Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none">• Tersusun dan terimplementasikannya secara efektif Rencana Aksi Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali di Nusa Penida	
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masih rendah	<ul style="list-style-type: none">• Literasi perilaku anti korupsi belum berlangsung secara sistematis, termasuk melalui Lembaga Pendidikan• Masih kentalnya budaya permisif (memaklumi) terhadap tindakan korupsi	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2022	
Penerimaan pajak daerah masih rendah	<ul style="list-style-type: none">• Potensi pajak daerah belum tergali secara optimal• Tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak masih rendah• Menurunnya perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19	Tercapainya rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 3,85% pada tahun 2023	

Rekomendasi

Mengacu pada Pasal 15 sampai Pasal 20 PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2018, maka direkomendasikan kepada Tim Penyusunan Pemutakhiran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Laporan Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 ini agar dimanfaatkan dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.
2. Laporan Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang dimanfaatkan dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 untuk muatan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah.
 - b. Tujuan.
 - c. Isu strategis daerah.
 - d. Permasalahan.
 - e. Sasaran strategis daerah.
3. Gambaran umum kondisi daerah yang dimanfaatkan dalam dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 berupa:
 - a. Aspek geografis dan demografis, mencakup analisis yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung untuk pembangunan daerah.
 - b. Aspek kesejahteraan masyarakat, mencakup analisis kondisi ekonomi.
 - c. Aspek pelayanan umum, mencakup analisis kesinambungan pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan dalam mencapai target pembangunan



- di akhir tahun Dokumen Pemutakhiran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.
- d. Aspek daya saing daerah, mencakup analisis peningkatan potensi daerah dalam mendukung keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.
4. Tujuan, isu strategis daerah, dan permasalahan yang dimanfaatkan dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 berupa tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan upaya tambahan. Isu strategis daerah, dan permasalahan menurut TPB tersebut sebagai berikut:
- a. Tujuan 1: mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun, meliputi indikator:
- 1) Tingkat kemiskinan relatif tinggi walaupun telah berada di atas target nasional, dengan permasalahan:
 - Terpuruknya perekonomian daerah sebagai dampak pandemi COVID-19 tahun 2020.
 - 2) Jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, dengan permasalahan:
 - Menurunnya BPJS penerima upah yang disebabkan karena menurunnya jumlah perusahaan yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai dampak dari pandemic Covid-19 tahun 2020.
 - 3) Belum seluruhnya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya, dengan permasalahan:
 - Data penyandang disabilitas kelompok miskin dan rentan masih belum valid.
 - 3) Rumah tangga kumuh perkotaan masih tinggi, dengan permasalahan:
 - Terbatasnya kemampuan rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak di perkotaan.
 - 4) Tingkat risiko bencana masih tinggi, dengan permasalahan:
 - Ancaman bencana beragam dengan tingkat bahaya berkisar sedang sampai tinggi.
 - Tingginya tingkat kerentanan (sosial, ekonomi dan lingkungan) kategori sedang sampai tinggi.
 - Kapasitas penanggulangan bencana masih kategori sedang.
 - Strategi peningkatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam belum terbangun.
- b. Tujuan 2: menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
- 1) Kualitas konsumsi pangan masih rendah yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan, dengan permasalahan:
 - Tingkat keanekaragaman pangan masih rendah.
 - Perubahan pola konsumsi mengarah pada kegemaran terhadap makanan instan cenderung meningkat.
 - Ketersediaan ikan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat masih terbatas.
 - Kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan masih rendah.
 - 2) Terancamnya sistem produksi pangan yang berkelanjutan, dengan permasalahan:



- Tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian.
- 3) Rendahnya produktivitas pangan, dengan permasalahan:
 - Infrastruktur pengairan/irigasi pertanian masih terbatas.
 - Jumlah pelepasan varietas unggul tanaman masih kecil.
 - Perubahan iklim.
- c. Tujuan 3: menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
 - 1) Angka infeksi baru HIV meningkat, dengan permasalahan:
 - Kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS masih rendah.
 - 2) Kecenderungan meningkatnya kematian akibat penyakit tidak menular seperti akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis, dengan permasalahan:
 - Perilaku dan pola hidup sehat di kalangan masyarakat belum optimal
 - Tekanan (*stress*) di kalangan masyarakat cenderung meningkat
 - 3) Prevalensi obesitas pada penduduk umur <18 tahun masih tinggi dengan permasalahan:
 - Perilaku dan pola makan yang tidak sehat.
 - 4) Prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat, dengan permasalahan:
 - Komunikasi, informasi dan edukasi penyalahgunaan narkoba masih belum optimal.
 - Pengawasan peredaran gelap narkoba masih kurang efektif.
 - Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku (pedagang dan pemakai).
 - Modus peredaran dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang.
 - Pergaulan sosial yang tidak sehat.
- d. Tujuan 4: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
 - 1) Tingkat kemampuan membaca dan matematika siswa SD masih rendah, dengan permasalahan:
 - Manajemen kurikulum dan pembelajaran belum optimal.
 - 2) Angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun masih rendah, dengan permasalahan:
 - Masih terbatasnya kesempatan mendapatkan pendidikan keaksaraan bagi penduduk umur ≥ 15 tahun yang tidak bersekolah.
 - Rendahnya motivasi mengikuti pendidikan keaksaraan bagi penduduk umur ≥ 15 tahun yang tidak bersekolah.
 - 3) Akses pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA/SMK belum merata yang ditandai oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) yang masih relatif rendah, dengan permasalahan:
 - Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan belum merata.
 - Kondisi geografis dan jarak rata-rata sekolah relatif jauh menghambat minat melanjutkan pendidikan.
 - 4) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun, dengan permasalahan:



- Banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar dan bahkan tidak pernah sekolah.
 - Rendahnya minat dan kesempatan bagi penduduk di atas 25 tahun untuk mengikuti paket A, B dan C.
- 5) Belum meratanya akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan permasalahan:
- Ketersediaan fasilitas PAUD belum merata sampai ke pelosok desa.
- 6) Kualitas guru pada semua tingkatan pendidik belum merata, dengan permasalahan:
- Tingkat pendidikan guru sebagian belum memenuhi persyaratan sertifikasi pendidik.
- e. Tujuan 6: menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- 1) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri khususnya untuk Klungkung kepulauan masih terbatas, dengan permasalahan:
- Sumber air baku di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sangat terbatas.
 - Sumber air baku yang tersedia di Nusa Penida sulit diakses.
- 2) Belum meratanya akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, dengan permasalahan:
- Sumber dan jaringan distribusi air minum belum merata.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan air limbah di perkotaan dan kawasan pariwisata, dengan permasalahan:
- Belum terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
- 4) Belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan pengelolaan lumpur tinja, dengan permasalahan:
- Belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah Klungkung kepulauan.
- 5) Belum berkembangnya secara optimal upaya penghematan air pada sektor pertanian, industri dan pariwisata, dengan permasalahan:
- Pembinaan kepada masyarakat dalam upaya penghematan air melalui inovasi dan/atau teknologi tepat guna yang ada belum optimal.
- 6) Lahan kritis di dalam kawasan hutan masih tinggi, dengan permasalahan:
- Alih fungsi lahan yang dapat mempercepat kelangkaan air dan menyebabkan lahan pada DAS rentan kritis.
 - Pengelolaan lahan kurang mempertimbangkan kaidah konservasi.
 - Perubahan iklim.
- f. Tujuan 7: menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
- 1) Masih rendahnya konsumsi listrik per kapita, dengan permasalahan:
- Infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik masih terbatas khususnya di Klungkung kepulauan.
- 2) Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) masih rendah, dengan permasalahan:
- Pemanfaatan sumber-sumber energi listrik baru dan terbarukan seperti tenaga angin, surya dan arus/gelombang laut untuk pengembangan pembangkit energi listrik terbarukan belum optimal.



- g. Tujuan 8. mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ber kelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pek erjaan yang layak bagi semua
- 1) Kinerja pertumbuhan ekonomi terkontraksi sangat parah sebagai dampak pandemi COVID-19, dengan permasalahan:
 - Tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata yang merupakan sektor yang paling terdampak pandemic.
 - Dalam jangka pendek, pemulihan ekonomi masih terkendala oleh pandemi COVID-19 yang masih belum dapat dipastikan berakhirnya sehingga masih diterapkannya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan transportasi.
 - Dalam jangka menengah, transformasi ekonomi masih dalam rangka penyeimbangan struktur perekonomian masih terkendala oleh rendahnya nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang ada.
 - 2) Masih rendahnya PDRB perkapita, dengan permasalahan:
 - Terpuruknya ekonomi karena dampak pandemi covid-19.
 - 3) Proporsi tenaga kerja formal masih rendah, dengan permasalahan:
 - Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah.
 - 4) Tingkat pengangguran terbuka meningkat sebagai dampak pandemi COVID-19, dengan permasalahan:
 - Tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata yang merupakan sektor yang paling terdampak pandemi.
 - 5) Persentase setengah pengangguran masih tinggi, dengan permasalahan:
 - Kurangnya akses terhadap pelatihan bagi calon dan tenaga kerja.
 - 6) Kinerja sektor pariwisata menurun sebagai dampak pandemi COVID-19, dengan permasalahan:
 - Pandemi COVID-19 masih belum berakhir dalam satu sampai dua tahun ke depan sehingga pembatasan perjalanan wisatawan mancanegara dan nusantara masih diterapkan.
 - Adanya varian baru virus corona menyebabkan Pemerintah dan sejumlah negara menerapkan kebijakan yang ketat keluar masuknya warga negara dan warga asing.
 - Kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih belum optimal sehingga Pemerintah masih menerapkan sejumlah kebijakan pembatasan orang-orang dalam bepergian.
- h. Tujuan 9: membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
- 1) Masih tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten, dengan permasalahan:
 - Pemeliharaan jalan belum optimal.
 - Sistem drainase jalan yang tidak baik.
 - Peningkatan beban yang melebihi beban rencana sehingga umur rencana jalan tidak tercapai.
 - 2) Konektivitas angkutan penyeberangan masih rendah antara Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan, dengan permasalahan:
 - Kapasitas Pelabuhan Padangbai sebagai sandingan penyeberangan Pelabuhan Mentigi/Nusa Penida sangat terbatas.



- Terhambatnya penyelesaian dermaga penyeberangan Gunaksa.
- 3) Menurunnya laju pertumbuhan industri pengolahan sebagai sektor unggulan daerah, dengan permasalahan:
 - Penumbuhan industri baru masih rendah.
 - Produktivitas industri pengolahan masih rendah.
 - Sentra-sentra IKM belum terbina secara optimal.
 - Pembangunan industri belum secara optimal melalui pendekatan terpadu antar sektor terutama dengan sektor pertanian dan pariwisata.
 - Pemerataan usaha industri masih rendah karena keterbatasan infrastruktur khususnya di wilayah kepulauan.
 - Tingkat penguasaan dan penerapan teknologi tepat guna dan ICT untuk mendukung pembangunan industri kecil dan menengah masih terbatas.
 - Akses permodalan usaha bagi IKM masih terbatas.
- 4) Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit masih rendah, dengan permasalahan:
 - Tingkat suku bunga pinjaman bagi IKM masih tinggi.
 - Aspek legalitas IKM.
 - IKM tidak memiliki tambahan agunan.
 - Pengusaha IKM tidak mengetahui prosedur pengajuan kredit.
 - Rendahnya kemampuan dalam pembukuan yang profesional.
- i. Tujuan 10: mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara-negara
 - 1) Masih tingginya kesenjangan ekonomi antar penduduk/masyarakat, dengan permasalahan:
 - Ketimpangan peluang dalam memperoleh pendapatan karena faktor tingkat pendidikan yang tidak merata.
 - Masih tingginya pekerja informal dengan produktivitas rendah.
 - Ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
 - Adanya konsentrasi kekayaan pada segelintir elit.
 - 2) Masih rendahnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, dengan permasalahan:
 - Kesadaran perusahaan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah
 - Pengawasan dan pembinaan masih sangat terbatas.
- j. Tujuan 11: mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
 - 1) Masih rendahnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, dengan permasalahan:
 - Fasilitas pengelolaan sampah perkotaan (penampungan, pengangkutan dan pengolahan) dan personil masih terbatas.
 - 2) Masih kecilnya proporsi ruang terbuka perkotaan, dengan permasalahan:
 - Terbatasnya lahan milik pemerintah atau lahan publik yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka.
- k. Tujuan 12: menjamin konsumsi dan produksi yang berkelanjutan



- 1) Pengelolaan limbah B3 belum optimal, dengan permasalahan:
 - Rendahnya kesadaran usaha/ kegiatan dalam pengelolaan limbah B3.
 - Lemahnya monitoring dan pembinaan pengelolaan limbah B3 terhadap usaha/ kegiatan yang memperoleh izin lingkungan.
- 2) Masih rendahnya timbulan sampah yang didaur ulang, dengan permasalahan:
 - Kapasitas/kemampuan masyarakat dalam melakukan daur ulang sampah masih rendah.
 - Terbatasnya dukungan fasilitas daur ulang sampah di tingkat masyarakat.
- l. Tujuan 13: mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
 - 1) Kapasitas daerah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih rendah, dengan permasalahan:
 - Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum terlaksana secara terpadu karena belum tersedianya dokumen RAD Adaptasi Perubahan Iklim.
- m. Tujuan 14: mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan
 - 1) Kontribusi perikanan terhadap perekonomian daerah belum optimal, dengan permasalahan:
 - Produksi perikanan tangkap akibat masih rendah karena kemampuan adaptasi nelayan terhadap perubahan pola migrasi ikan dan ketidakpastian cuaca sebagai dampak dari perubahan iklim.
 - Ditinggalkannya usaha budidaya rumput laut oleh masyarakat di Nusa Penida akibat kegagalan panen dan rendahnya harga rumput laut di tingkat produsen.
- n. Tujuan 15: melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
 - 1) Tingginya tingkat lahan kritis yang belum tertangani yaitu mencapai 43,53% dari luas wilayah yang terkonsentrasi di Kecamatan Nusa Penida, dengan permasalahan:
 - Penanganan lahan kritis belum dilakukan secara terencana dan terpadu.
 - 2) Tingginya tingkat lahan kritis di dalam kawasan hutan di Kecamatan Nusa Penida yaitu mencapai 81,21% dari luas total kawasan hutan, dengan permasalahan:
 - Penanganan lahan kritis di dalam kawasan hutan belum dilakukan secara terencana dan terpadu.
 - 3) Kritisnya populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) sebagai salah satu satwa terancam punah prioritas di Kecamatan Nusa Penida, dengan permasalahan:
 - Belum diketahuinya habitat dan jumlah populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) yang masih tersisa di Nusa Penida
 - Tingginya tingkat pemburuan liar terhadap Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) di masa lalu yang menyebabkan populasi satwa ini sangat terancam keubahannya
 - 4) Kecenderungan kemerosotan keanekaragaman hayati khususnya plasma nutfah lokal, dengan permasalahan:
 - Belum tersedianya dokumen Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati.
 - Belum optimalnya pengelolaan Nusa Penida sebagai wilayah sumber bibit sapi bali.



- o. Tujuan 16: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
 - 1) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masih rendah, dengan permasalahan:
 - Literasi perilaku anti korupsi belum berlangsung secara sistematis, termasuk melalui Lembaga Pendidikan.
 - Masih kentalnya budaya permisif (memaklumi) terhadap tindakan korupsi.
- p. Tujuan 17: menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
 - 1) Penerimaan pajak daerah masih rendah dan cenderung menurun, dengan permasalahan:
 - Potensi pajak daerah belum tergali secara optimal
 - Tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak masih rendah
 - Menurunnya perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19
5. Sasaran strategis daerah yang dimanfaatkan dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 sebagai berikut:
 - a. Tujuan 1: mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
 - 1) Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi **3,0%** di tahun 2023
 - 2) Meningkatnya jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan hingga menjadi **12,15%** di tahun 2023
 - 3) Cakupan penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100% pada tahun 2021-2023
 - 4) Tertanganinya permukiman kumuh hingga rumah tangga kumuh perkotaan menjadi 0% pada tahun 2023
 - 5) Menurunnya Indeks Risiko Bencana di seluruh kabupaten/kota di Bali hingga di bawah **89,98** di tahun 2023
 - 6) Tersedianya dokumen strategi pengurangan risiko bencana daerah di tahun 2023
 - b. Tujuan 2: menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
 - 1) Meningkatnya Pola Pangan Harapan menjadi hingga diatas angka 96,90 pada tahun 2023
 - 2) Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan mencapai 53,22 kg/kapita/tahun pada tahun 2023
 - 3) Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam revisi RTRW Kabupaten
 - 4) Meningkatnya produktivitas berbagai jenis pangan melalui penerapan praktek pertanian tangguh dan adaptasi terhadap perubahan iklim
 - c. Tujuan 3: menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
 - 1) Menurunnya angka infeksi baru HIV menurun hingga menjadi 0 per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV pada tahun 2023
 - 2) Menurunnya kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis pada angka sekecil-kecilnya hingga tahun 2023
 - 3) Menurunnya prevalensi obesitas pada penduduk umur <18 tahun menjadi 15,00% pada tahun 2023



- 4) Meningkatnya penyalahguna narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi medis 100% selama tahun 2019-2023
 - 5) Tersedianya kerjasama dengan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba
 - 6) Terkendalinya jumlah penyalahgunaan narkoba hingga mencapai angka 15 pada tahun 2023
- d. Tujuan 4: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
- 1) Proporsi anak kelas 4 yang mencapai standar minimum membaca mencapai 100% pada tahun 2023.
 - 2) Proporsi anak kelas 4 yang mencapai standar minimum matematika mencapai 100% pada tahun 2023.
 - 3) Proporsi anak kelas 6 yang mencapai standar minimum membaca mencapai 99,61% tahun 2023.
 - 4) Proporsi anak kelas 6 yang mencapai standar minimum matematika mencapai 100% tahun 2023.
 - 5) Proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar minimum membaca mencapai 87,25% pada tahun 2023.
 - 6) Proporsi anak kelas 9 yang mencapai standar minimum matematika mencapai 77,70% tahun 2023.
 - 7) Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun menjadi 96,47% pada tahun 2023.
 - 8) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD diatas 114,09% pada tahun 2019-2023.
 - 9) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP diatas 106,94% pada tahun 2019-2023.
 - 10) Meningkatnya APK SMA/SMK diatas 91,63% pada tahun 2019-2023.
 - 11) Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun mencapai 9,4 tahun pada tahun 2023.
 - 12) Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi 77,2% pada tahun 2023
 - 13) Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik mencapai 51,63% tahun 2023.
 - 14) Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik mencapai 66,21% tahun 2023.
 - 15) Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik mencapai 66,17% tahun 2023.
 - 16) Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik mencapai 52% tahun 2023.
- e. Tujuan 6: menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
- 1) Meningkatnya kapasitas infrastruktur/prasarana air baku di wilayah pulau-pulau kecil mencapai 331,32 liter/detik tahun 2023.
 - 2) Terpenuhinya akses layanan air minum aman dan berkelanjutan mencapai 100% pada tahun 2021.
 - 3) Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan (kawasan pariwisata) tahun 2023.



- 4) Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal sebanyak 5 unit tahun 2023.
 - 5) Terbangunnya 2 unit IPLT masing-masing di Nusa Lembongan dan Nusa Penida tahun 2023.
 - 6) Terbangunnya pilot project berbasis masyarakat penerapan reduce, reuse dan recycle dalam upaya penghematan air.
 - 7) Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 851,5 ha sampai tahun 2020.
- f. Tujuan 7: menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
- 1) Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh tahun 2023.
 - 2) Meningkatnya bauran energi terbarukan mencapai 7,58% pada tahun 2023.
- g. Tujuan 8. mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua
- 1) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi hingga menjadi 6,00% pada tahun 2023
 - 2) Meningkatnya PDRB perkapita menjadi 56,20 juta pada tahun 2023
 - 3) Meningkatnya tenaga kerja formal menjadi 51,79% pada tahun 2023
 - 4) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 0,60% pada tahun 2023
 - 5) Menurunnya tingkat setengah pengangguran menjadi 19,72% pada tahun 2023
 - 6) Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB menjadi di atas 15,50% pada tahun 2023
 - 7) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara seiring dengan meredanya pandemi COVID-19 pada tahun 2021-2023
 - 8) Meningkatnya jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja menjadi di atas 14% pada tahun 2023
- h. Tujuan 9: membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
- 1) Meningkatnya kondisi jalan kabupaten mantap menjadi 100% tahun 2023.
 - 2) Beroperasinya pelabuhan/dermaga penyeberangan Bias Munjul tahun 2022.
 - 3) Beroperasinya pelabuhan/dermaga penyeberangan Gunaksa (di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali) tahun 2023.
 - 4) Meningkatnya laju pertumbuhan industri pengolahan hingga melebihi laju pertumbuhan pertumbuhan PDRB.
 - 5) Meningkatnya kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah mencapai 11,88% tahun 2023.
 - 6) Meningkatnya proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit mencapai 20% pada tahun 2023.
- i. Tujuan 10: mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara-negara
- 1) Menurunnya Koefisien Gini pada tahun 2023 menjadi 0,36.
 - 2) Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan menjadi 24,08% tahun 2023.
- j. Tujuan 11: mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan



- 1) Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 90% pada tahun 2022.
- 2) Meningkatnya proporsi ruang terbuka perkotaan secara bertahap hingga 11,3% tahun 2023.
- k. Tujuan 12: menjamin konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
 - 1) Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola secara tepat oleh usaha/kegiatan yang memperoleh izin lingkungan.
 - 2) Meningkatnya jumlah fasilitas Tempat Olah Sampah Setempat (TOS) hingga mencapai 38 unit pada tahun 2023.
- l. Tujuan 13: mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
 - 1) Tersedianya RAD Adaptasi Perubahan Iklim pada tahun 2023
- m. Tujuan 14: mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan
 - 1) Meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 2.750 ton pada 2023.
 - 2) Meningkatnya produksi rumput hingga mencapai 50.000 ton pada tahun 2023.
- n. Tujuan 15: melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
 - 1) Menurunnya proporsi lahan kritis dan sangat kritis menjadi 38,56% pada tahun 2023.
 - 2) Meningkatnya penanganan lahan kritis di dalam kawasan hutan mencapai 11,4% pada tahun 2023.
 - 3) Ditetapkannya habitat perlindungan Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) berbasis masyarakat di Nusa Penida.
 - 4) Meningkatnya 10% populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) pada tahun 2023.
 - 5) Tersedianya dokumen Rencana Aksi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati pada tahun 2021 sebagai pedoman pelestarian keanekaragaman hayati khususnya plasma nutfah sumber pangan lokal.
 - 6) Tersusun dan terimplementasikannya secara efektif Rencana Aksi Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali di Nusa Penida.
- o. Tujuan 16: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
 - 1) Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2022.
- p. Tujuan 17: menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
 - 1) Tercapainya rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 3,85% pada tahun 2023.



Penutup

Laporan Induk Pemutakhiran KLHS RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 merupakan salah satu Laporan KLHS dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Permasalahan utama dalam pembuatan KLHS ini adalah ketersediaan data yang sesuai dengan indikator-indikator dalam TPB. Oleh karena beberapa indikator masih belum dapat dipenuhi untuk proses analisis dan skenarionya.

Untuk memastikan laporan KLHS RPJMD ini dimuat dalam Rancangan Awal Pemutakhiran Dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, Tim Penyusun RPJMD melakukan penelaahan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya Bupati cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan memeriksa hasil penelaahan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan Ranwal RPJMD, laporan KLHS RPJMD, dan hasil penelaahan pembangunan berkelanjutan.